

**LAPORAN KINERJA
(LKj)**

TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan. A. Syairani Pelaihari

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) adalah upaya pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD), sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Pasal 18 PERPRES tersebut, menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, pelaksanaannya telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja tahun 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menyajikan beberapa hal mengenai indikator pencapaian, baik melalui pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran. Indikator sasaran tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2022, pada dasarnya telah terakomodir dalam indikator tahun 2022.

Pada tahun 2022, realisasi Fisik yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut di angka 99,37%, sedangkan realisasi Keuangannya sebesar 85,91%.

Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan ada kesungguhan, keseriusan, dan komitmen yang kuat, serta kerja sama dari semua pihak terkait untuk saling mengisi maupun memberikan saran atau masukannya kepada seluruh jajaran PNS di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 09 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680916 199010 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategi (Renstra).

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja selalu diharapkan saran dan kritik yang membangun, serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022, disampaikan terimakasih

Pelaihari, 09 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680916 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	4
D. Produk dan Layanan.....	5
E. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Visi RPJMD	7
B. Misi RJMD	7
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
D. Indikator Kinerja Utama.....	9
E. Perjanjian Kinerja.....	11
F. Program dan Kegiatan	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	14
1. Sasaran RPJMD.....	14
2. Sasaran Eselon II.....	15
3. Sasaran Eselon III.....	22
B. Akuntabilitas Keuangan	49
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022	49
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	49
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	52

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Perjanjian Kinerja 2022
4. Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulanan (I – IV)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tanah Laut salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dimana strukturnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, BAPENDA Kabupaten Tanah Laut berwenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pasal 18 menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaannya juga telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014.

Berakhirnya tahun 2022 menunjukkan BAPENDA Kabupaten Tanah Laut telah menyelesaikan pelaksanaan program/kegiatan selama satu tahun anggaran. Atas hasil kerja dan capaian kinerja dalam satu tahun ini disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pelaporan penyampaian kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja SKPD. Dalam menyusun LKJ BAPENDA Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 antara lain didasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menurut Pasal 30 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021, yaitu

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah.
4. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah.
5. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan, terdiri atas;
 - a. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan; dan
 - b. Sub Bidang Retribusi Daerah;
6. UPTD Badan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia / susunan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 41 orang terdiri dari 27 orang PNS dan 14 orang PTT yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat Jabatan
1	2	3	4
1.	Kepala Badan	1	Pimpinan
2.	Sekretaris	1	Pejabat Administrator
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	Pejabat Pengawas
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	Pejabat Pengawas
5.	Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan	1	Pejabat Administrator
6.	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah	-	Pejabat Pengawas
7.	Kasubbid Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
8.	Kabid Pengelolaan Pajak Daerah	1	Pejabat Administrator
9.	Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
10.	Kasubbid Pelayanan Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
11.	Kabid Pendapatan Lain-lain, Retda dan Pelaporan	1	Pejabat Administrator
12.	Kasubbid Retda	1	Pejabat Pengawas
13.	Kasubbid Pendapatn Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan	1	Pejabat Pengawas

LKj BAPENDA TAHUN 2022

Tabel 1.2
Susunan PNS berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)
1	2	3	4
1.	IV/c	S-2	1
2.	IV/b	S-2	1
3.	IV/a	S-2	1
4.	IV/a	S-1	3
5.	III/d	S-1	3
6.	III/c	S-1	3
7.	III/c	D-3	1
8.	III/b	S-1	1
9.	III/b	D-3	1
10.	III/a	S-1	4
11.	III/a	D-3	2
12.	II/d	D-3	2
13.	II/d	SLTA	3
14.	I/d	SLTP	1

Tabel 1.3
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan Non PNS

No.	-Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	3	JFT
2.	Verifikator Keuangan	1	Pelaksana
3.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	Pelaksana
4.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	Pelaksana
5.	Bendahara	1	Pelaksana
6.	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	2	Pelaksana
7.	Pengadministrasi Umum	4	Pelaksana
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	1	Pelaksana
9.	Pengelola Pendapatan	1	Pelaksana
10.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1	Pelaksana
11.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	14	Non PNS

8. Isu Strategis

Permasalahan pembangunan dalam RPJMD pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, pada poin Keuangan, disebutkan dua permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah, yakni belum akuratnya database pajak dan retribusi daerah, serta belum optimalnya penggalan potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah. Selain itu, permasalahan tambahan yakni kondisi Kabupaten Tanah Laut yang masih

dalam fase pemulihan pasca pandemi COVID-19 menguatkan 2 permasalahan di RPJMD tadi.

Dua permasalahan tersebut menjadi isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang mana isu strategis ini sesuai dengan sasaran Badan Pendapatan Daerah, yaitu “Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi”.

9. Produk dan Layanan

Produk dan layanan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Tanah Laut meliputi:

- a. Pelayanan pungutan dan konsultasi Pajak Daerah yang terdiri dari 11 Jenis Pajak
- b. Pelayanan pungutan Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Penyewaan Bangunan, dan Pemakaian Ruangan)
- c. Pelayanan koordinasi dengan SKPD penerima Retribusi Daerah
- d. Pelayanan koordinasi dengan SKPD penerima Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- e. Pelayanan koordinasi dengan SKPD penerima Lain-lain PAD yang Sah
- f. Pelayanan konsultasi / kaji tiru Pendapatan Daerah dengan Instansi Pemerintah Daerah lainnya.

10. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD

- B. Misi RPJMD
 - C. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - D. Indikator Kinerja Utama
 - E. Perjanjian Kinerja
 - F. Program dan Kegiatan
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon II
 - 3. Eselon III
 - Eselon IV
 - B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022
 - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022
- BAB IV PENUTUP**
- A. Simpulan
 - B. Strategi Peningkatan Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Visi RPJMD

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, yaitu

“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi”

Dalam visi itu terkandung makna sebagai berikut :

1. **Berkarya** : Makna kata “berkarya” lebih tinggi dari pada “bekerja” ; yaitu merujuk pada hasil kerja, yaitu: secara bersama-sama, berkarya mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.
2. **Inovasi** : Adalah solusi logis terhadap kelangkaan. Inovasi adalah terobosan cara kerja, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan / adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. **Tertata** : Bermakna tertib administrasi dan tertib substansi, yaitu pemerintahan yang tertata dan terkelola dengan baik (*Good Governance*).
4. **Relegius** : Aktualisasi nilai dan prinsip keagamaan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat.
5. **Aktual** : Pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani.
6. **Sinergi** : Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

B. Misi RPJMD

Sebagaimana Visi RPJMD Kabupaten Tanah Laut, agar dapat diwujudkan harus diperinci ke dalam Misi. Berdasarkan Visi RPJMD tersebut di atas kemudian dijabarkan ke dalam 5 Misi, sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat,
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterkaitan Misi RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut ada pada Misi ke-3 (tiga), yaitu : **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik.**

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak tercantum di RPJMD Kabupaten Tanah Laut, namun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dirumuskan menjadi 3 tujuan, yaitu;

- 1. Meningkatkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;**
- 2. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang sah;**
- 3. Mewujudkan tata kelola SKPD yang tertib, efektif dan efisien.**

Adapun sasaran yang menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang tercantum di Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu

- **Sasaran Strategis**

- 1. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi**

- **Sasaran Program**

- 2. Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid;**
- 3. Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah;**
- 4. Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah;**
- 5. Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;**
- 6. Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB);**
- 7. Menurunnya tunggakan PBB-P2;**
- 8. Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah;**
- 9. Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah;**
- 10. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah**

D. Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKU) yang mana IKU ini diemban oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

Tabel 2.1
Tabel IKU Badan Pendapatan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CARA HITUNG
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun berjalan (n)} - \text{Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$
	2. Persentase Pertumbuhan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD tahun berjalan (n)} - \text{Realisasi PAD tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Realisasi PAD tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$
	3. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan (n)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah tahun berjalan (n)}} \times 100\%$

Adapun Indikator Kinerja yang diemban oleh Eselon III yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yaitu

Tabel 2.2
Tabel Indikator Kinerja Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	$(\text{Realisasi Rupiah PBB-P2 dan BPHTB tahun berjalan} \div \text{Target Rupiah PBB-P2 dan BPHTB tahun berjalan}) \times 100$
Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	$(\text{Realisasi Rupiah Pajak Daerah (non PBB-P2 & BPHTB) tahun berjalan} \div \text{Target Rupiah Pajak Daerah (non PBB-P2 & BPHTB) tahun berjalan}) \times 100$
Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	$(\text{Realisasi tunggakan PBB-P2 tertagih tahun berjalan} \div \text{Target tunggakan PBB-P2 tertagih tahun berjalan}) \times 100$

Tabel 2.3
Tabel Indikator Kinerja Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	$(\text{Data Wajib Pajak tidak valid tahun berjalan} \div \text{Data Wajib Pajak tahun berjalan}) \times 100$

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Apakah 11 Jenis Pajak Terealisasi ? Ya = 100 % Tidak = (Jumlah Jenis Pajak Terealisasi ÷ 11) × 100
Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	(Realisasi Ketetapan tahun berjalan ÷ Target Ketetapan tahun berjalan) × 100

Tabel 2.4
Tabel Indikator Kinerja Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	(Realisasi PLL & Retribusi Daerah tahun berjalan (n) - Realisasi PLL & Retribusi Daerah tahun sebelumnya (n-1)) ÷ Realisasi PLL & Retribusi Daerah tahun sebelumnya (n-1) × 100
Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	(Realisasi PLL tahun berjalan (n) - Realisasi PLL tahun sebelumnya (n-1)) ÷ Realisasi PLL tahun sebelumnya (n-1) × 100
	Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	(Realisasi Retribusi Daerah tahun berjalan (n) - Realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya (n-1)) ÷ Realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya (n-1) × 100

Penerimaan/Pendapatan Lain-Lain (PLL) adalah jumlah dari Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Tabel 2.5
Tabel Indikator Kinerja Sekretariat Badan Pendapatan Daerah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	Pengolahan dan Analisis Data
	Nilai Hasil Evaluasi RB	Hasil Evaluasi dari Inspektorat
	Nilai Hasil Evaluasi ZI	Hasil Evaluasi dari Inspektorat
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Hasil Evaluasi dari Inspektorat
	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang Ditindaklanjuti	(Jumlah temuan yang ditindaklanjuti ÷ Jumlah temuan) × 100

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 berdasarkan Renstra 2018-2023 serta Sub Kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Tahun 2022, dimana telah tergambar target kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran. Sasaran Strategis/SKPD/ OPD menjadi Kinerja Utama Eselon II, Sasaran Program menjadi Kinerja Utama Eselon III, dan Kinerja Utama Eselon IV berdasarkan Sub Kegiatan yang diembannya. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diemban oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan IKU, adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1.	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8,00
	2.	Persentase Pertumbuhan PAD	4,12
	3.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,63

Tabel 2.7
Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100%
Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100%
Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	2,3%

Tabel 2.8
Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	6%
Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100%
Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100%

Tabel 2.9
Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	5,00%
Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	4,50%
	Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	0,76%

Tabel 2.10
Tabel Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	80 (B)
	Nilai Hasil Evaluasi RB	77 (BB)
	Nilai Hasil Evaluasi ZI	77 (BB)
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77 (BB)
	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100%

F. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Kegiatan terbagi lagi menjadi Sub Kegiatan. Ada 2 Program yang dijalankan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, berikut ini rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada untuk mencapai Sasaran Strategis :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 4) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 5) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - 6) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - 7) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
 - 8) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - 9) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki hubungan dengan sasaran yang ada di RPJMD. Sasaran RPJMD ini akan menjadi tujuan dari SKPD, sehingga Bapenda merumuskan sendiri tujuan SKPD-nya. tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dirumuskan menjadi 3 tujuan, yaitu;

- 1. Meningkatkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;**
- 2. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang sah;**
- 3. Mewujudkan tata kelola SKPD yang tertib, efektif dan efisien.**

Adapun sasaran yang menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang tercantum di Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu

- **Sasaran Strategis**

- 1. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi**

- **Sasaran Program**

- 2. Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid;**
- 3. Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah;**
- 4. Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah;**
- 5. Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;**
- 6. Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB);**
- 7. Menurunnya tunggakan PBB-P2;**
- 8. Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah;**
- 9. Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah;**
- 10. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah**

11. Eselon II

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang menjadi Kinerja Utama Kepala Badan (Eselon II) memiliki 3 Indikator Kinerja Utama dan 3 Target dari 1 Kinerja Utama. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Badan memiliki 26 orang ASN dan 14 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan anggaran Rp 10.768.280.277, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 9.250.663.040 (85,91%). Berikut ini realisasi dari target Kepala Badan (Eselon II) pada Tahun 2022 :

Tabel 3.3
Tabel Target dan Realisasi IKU

Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Target %	Realisasi %	Capaian %
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1.	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8,00	5,98	74,76
	2.	Persentase Pertumbuhan PAD	4,12	-5,94	-144,19
	3.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,63	8,98	104,05

Tabel 3.4
Tabel Perbandingan Realisasi IKU Kab. Tanah Laut dengan Kab. Penajam Paser Utara

Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kab. Tanah Laut %	Realisasi Kab. Penajam Paser Utara %
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1.	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5,98	69,77
	2.	Persentase Pertumbuhan PAD	-5,94	42,66
	3.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,98	7,13

Indikator 1 : Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perhitungan Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, sebagai berikut :

Realisasi Pajak Daerah 2022 : Rp. 45.363.440.225,80
Realisasi Retribusi Daerah 2022 : Rp. 6.971.598.007,00 +
Total : Rp. 52.335.038.232,80

Realisasi Pajak Daerah 2021 : Rp. 43.638.422.656,00
Realisasi Retribusi Daerah 2021 : Rp. 5.743.153.528,80 +
Total : Rp. 49.381.576.184,80

$$\begin{aligned} \text{Realisasi 2022} &= \frac{(52.335.038.232,80 - 49.381.576.184,80)}{49.381.576.184,80} \times 100 \\ &= 5,98\% \end{aligned}$$

Tabel 3.5
Tabel Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun	Target PD&RD (Rp)	Realisasi PD&RD (Rp)	Target Pertumbuhan PD&RD %	Realisasi Pertumbuhan PD&RD %	Capaian %
2018	33.488.933.500,00	39.477.986.870,00	7,50	7,62	102,6
2019	45.389.936.500,00	55.981.772.279,00	7,50	41,81	557,4
2020	43.991.623.550,00	52.094.294.671,00	7,80	-6,94	-89,97
2021	47.916.915.303,00	49.381.576.184,80	8,00	-5,21	-65,09
2022	48.952.869.500,00	52.335.038.232,80	8,00	5,98	74,25

Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2022 sukses meningkat sebesar 5,98% dari tahun 2021. Pencapaian tahun 2022 dibawah target Renstra 2018-2023 sebesar 8,00%. Namun, Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar 106,91%. Porsi Pajak Daerah pada Total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 86,68%. Realisasi Pajak Daerah diatas target, yakni 110,64%. Adapun penyebab Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih dibawah target pertumbuhan, yaitu:

- Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meningkat, namun Retribusi Daerah terealisasi 87,66%, dimana target sebesar Rp 7.952.619.500,00 terealisasi sebesar Rp 6.971.598.007,00. Retribusi Daerah sebetulnya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 21,16%. Realisasi Retribusi Daerah 87,66% tahun 2022 dikarenakan tidak terealisasinya retribusi imb di retribusi kecamatan sehubungan dengan adanya retribusi PBG.

- b. Menurunnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari tahun 2021 sebesar 32,90% walaupun Realisasi BPHTB tahun 2022 diatas target sebesar 129,20%. Menurunnya BHPTB tahun 2022 ini karena menurunnya transaksi jual beli tanah dibanding 2021, sehingga targetnya pun diturunkan dibanding 2021.
- c. Menurunnya Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dibanding tahun 2021 sebesar 19,68% walaupun realisasi terhadap target 2022 sebesar 124,98%. Hal ini dikarenakan tidak diketahui kapan panen dan jumlah produksinya, serta kurangnya kesadaran wajib pajak sarang burung walet.
- d. Menurunnya Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibanding tahun 2021 sebesar 2,67% walaupun realisasi terhadap target 2022 sebesar 116,59%. Menurunnya realisasi PBB-P2 karena ada kegiatan pemutakhiran data PBB-P2 yang menyebabkan objek pajak yang semula wajib pajak menjadi fasilitas umum sehingga tidak bisa ditarik lagi. Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar.

Rencana Aksi pada tahun 2022 yang sudah dilakukan untuk raihan target ini yaitu

- a. Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Tim Kepatuhan Pajak Daerah yang terdiri dari lintas sektor dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan penertiban terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan SKPD Penghasil Retribusi Daerah.
- c. Melakukan kajian-kajian potensi pajak dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah

Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun 2023 terhadap target dari indikator kinerja, yaitu :

- a. Melakukan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Masyarakat
- b. Mendata Wajib Pajak dan Objek Pajak Baru agar dapat meningkatkan Pajak Daerah
- c. Menaikkan NJOP PBB-P2
- d. Meningkatkan kegiatan penagihan piutang Pajak Daerah.

Apabila dibandingkan dengan daerah yang secara geografis mirip dengan Kab. Tanah Laut, yakni Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi

Kalimantan Utara yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, secara presentase, Kab. Penajam Paser Utara mampu menunjukkan realisasi Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar 69,77%, lebih tinggi dari Kab. Tanah Laut yang sebesar 5,94%. Persentase realisasi Kab. Penajam Paser Utara yang tinggi ini disebabkan rendahnya realisasi secara keuangan tahun 2021, bahkan lebih rendah 35,21% Kab. Tanah Laut pada tahun 2021. Sedangkan persentase realisasi Kab. Penajam Paser Utara tahun 2022 secara keuangan lebih tinggi 3,82% dibanding Kab. Tanah Laut. Realisasi Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2022 Kab. Penajam Paser Utara yang secara persentase pertumbuhan lebih baik daripada Kab. Tanah Laut ini disebabkan mulai pulihnya dari dampak COVID-19 serta adanya proyek IKN.

Tabel 3.6

Tabel Perbandingan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tanah Laut dengan Kab. Penajam Paser Utara

Tahun	Realisasi PD&RD Kab. Tanah Laut (Rp)	Realisasi PD&RD Kab. PPU (Rp)	Realisasi Pertumbuhan PD&RD Kab. Tala %	Realisasi Pertumbuhan PD&RD Kab PPU %
2021	49.381.576.184,80	31.993.815.318	5,21	-
2022	52.335.038.232,80	54.316.891.169	5,98	69,77

Indikator 2 : Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perhitungan Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

Realisasi PAD 2022 : Rp 193.890.015.753,87

Realisasi PAD 2021 : Rp 206.135.630.696,00

$$\begin{aligned} \text{Realisasi 2022} &= \frac{(193.890.015.753,87 - 206.135.630.696,00)}{206.135.630.696,00} \times 100 \\ &= -5,94\% \end{aligned}$$

Tabel 3.7

Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Target Pertumbuhan PAD %	Realisasi Pertumbuhan PAD %	Capaian %
2018	123.933.259.528,00	132.709.987.497,69	-2	-29,10	-1355
2019	155.187.372.673,62	169.904.868.483,69	3,89	28,03	720,57
2020	175.534.277.786,00	189.645.703.406,77	10,15	11,62	114,48
2021	167.212.726.505,00	206.135.630.696,00	4,86	8,70	179,01
2022	155.994.346.605,00	193.890.015.753,87	4,12	-5,94	-144,19

Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 menurun sebesar 5,94% dari 2021. Walaupun realisasi PAD tahun 2022 terhadap target PAD tahun 2022 sebesar 124,29%, pencapaian tahun 2022 ini dibawah target

Renstra 2018-2023 sebesar 4,12%. Adapun penyebab pencapaian tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021, selain karena menurunnya BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Sarang Burung Walet, penyebab lainnya adalah menurunnya Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 sebesar 11,14% dibanding tahun 2021. Hal ini dikarenakan Barang Milik Daerah yang dijual oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lebih sedikit dari tahun 2021. Selain itu, Pendapatan Bunga tahun 2022 yang nihil dibanding 2021 sebesar Rp 16.808.219.173,00 berpengaruh pada turunnya Lain-lain PAD yang Sah.

Rencana Aksi pada tahun 2022 yang sudah dilakukan untuk raihan target ini yaitu

- a. Melaksanakan pelayanan terkait Pajak Daerah di desa-desa mengikuti jadwal Manunggal.
- b. Pemberian sanksi penundaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan Gaji Pegawai Tidak Tetap di lingkup Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut jika tidak melakukan pembayaran PPBP2.
- c. Evaluasi tarif-tarif yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi daerah
- d. Memasang alat perekam data transaksi yang berjumlah 24 unit di Rumah makan dan 1 Hotel.

Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun 2023 terhadap target dari indikator kinerja yaitu dengan melakukan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Masyarakat dengan harapan masyarakat menyadari pentingnya pembayaran Pajak Daerah untuk membangun Kabupaten Tanah Laut. Aksi selanjutnya yaitu mendata Wajib Pajak dan Objek Pajak Baru sehingga diharapkan mampu menambah realisasi Pajak Daerah. Aksi selanjutnya menaikkan NJOP PBB-P2, hal ini sebagai penyesuaian atas meningkatnya harga tanah dan bahan bangunan. Aksi yang terakhir yaitu meningkatkan kegiatan penagihan piutang Pajak Daerah, hal ini diharapkan masyarakat menyadari atas kewajiban pajak dan pentingnya pajak untuk kontribusi pembangunan daerah.

Apabila dibandingkan dengan Kab. Penajam Paser Utara, secara presentase, Kab. Penajam Paser Utara mampu menunjukkan realisasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar 42,66%, lebih tinggi dari Kab. Tanah Laut yang sebesar -5,94%. Persentase realisasi Pertumbuhan PAD Kab. Penajam Paser Utara yang tinggi ini disebabkan

rendahnya realisasi secara keuangan tahun 2021, bahkan lebih rendah 57,36% Kab. Tanah Laut pada tahun 2021. Begitu juga dengan persentase realisasi PAD Kab. Penajam Paser Utara secara keuangan tahun 2022 lebih rendah 32,87% dibandingkan dengan Kab. Tanah Laut. Realisasi Pertumbuhan PAD tahun 2022 Kab. Penajam Paser Utara ini yang secara persentase pertumbuhan lebih baik dari Kab. Tanah Laut disebabkan mulai pulihnya dari dampak COVID-19 serta adanya proyek IKN.

Tabel 3.8
Tabel Perbandingan Realisasi PAD Kab. Tanah Laut dengan Kab. Penajam Paser Utara

Tahun	Realisasi PAD Kab. Tanah Laut (Rp)	Realisasi PAD Kab. PPU (Rp)	Realisasi Pertumbuhan PAD Kab. Tala %	Realisasi Pertumbuhan PAD Kab PPU %
2021	206.135.630.696,00	87.892.163.416,35	8,70	-
2022	193.890.015.753,87	125.386.713.912,32	-5,94	42,66

Indikator 3 : Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Perhitungan Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah sebagai berikut :

Realisasi PAD 2022 : Rp 193.890.015.753,87
 Realisasi Pendapatan Daerah 2022 : Rp 2.159.239.661.099,87

$$\text{Realisasi 2022} = 193.890.015.753,87 / 2.159.239.661.099,87 \times 100 = 8,98 \%$$

Tabel 3.9
Tabel Target dan Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Target %	Realisasi %	Capaian %
2018	132.709.987.497,69	1.563.204.358.501,69	8,49	8,49	100
2019	169.904.868.483,69	1.871.654.381.971,69	8,22	9,08	110
2020	189.645.703.406,77	1.613.795.315.121,77	8,64	11,75	136
2021	206.135.630.696,00	1.522.901.390.517,00	8,66	13,54	156
2022	193.890.015.753,87	2.159.239.661.099,87	8,63	8,98	104

Secara umum, Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (bisa disebut Tingkat Kemandirian Fiskal) dalam target Renstra 2018-2023 masih pada kategori “Rendah Sekali” karena masih dibawah 25%. Tingkat Kemandirian Fiskal pada tahun 2022 berhasil pada angka 8,98%. Artinya, Pendapatan Asli Daerah dapat berkontribusi pada APBD sebesar 8,98%. Pencapaian ini berhasil diatas target Renstra 2018-2023 sebesar 8,63%.

Namun, pencapaian tahun 2022 ini lebih rendah 4,56% dari tahun 2021. Adapun kendala pencapaian tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021, yaitu :

- a. Menurunnya Realisasi PAD 2022 sebagai pembilang sebesar 5,94% dari tahun 2021.
- b. Meningkatnya Pendapatan Daerah 2022 sebagai penyebut sebesar 41,78% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya penerimaan dari Pendapatan Transfer sebesar 54,04% dari tahun 2021. Walaupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menurun sebesar 94,93% dari tahun 2021. Porsi Pendapatan Transfer pada Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar 90,92%.

Rencana Aksi yang sudah dilakukan pada tahun 2022 untuk pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pajak PBB-P2 di Kecamatan Panyimpatan.
- b. Melakukan revisi peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
- c. Melakukan pengawasan terhadap objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah
- d. Sosialisasi dan edukasi kepada para wajib pajak daerah agar taat dalam melaksanakan kewajibannya.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 agar target dari indikator kinerja terealisasi, yaitu dengan mendata Wajib Pajak dan Objek Pajak Baru agar Pajak Daerah dapat ditingkatkan. Selanjutnya, NJOP PBB-P2 dinaikkan sebagai penyesuaian dengan keadaan terkini. Aksi berikutnya, kegiatan penagihan piutang Pajak Daerah lebih ditingkatkan, dengan harapan masyarakat menyadari kewajiban pajaknya dapat berkontribusi untuk pembangunan daerah., Aksi penting yang terakhir, yaitu melakukan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Masyarakat agar kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah meningkat.

Apabila dibandingkan dengan Kab. Penajam Paser Utara, secara presentase, Kab. Tanah Laut mampu menunjukkan realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian Fiskal) tahun 2022 sebesar 8,98%, lebih tinggi dari Kab. Penajam Paser Utara yang sebesar 7,13%. Hal ini disebabkan persentase realisasi PAD Kab. Penajam Paser Utara secara keuangan tahun 2022 lebih rendah 35,33% dibandingkan dengan Kab.

Tanah Laut (Realisasi PAD Kab. Tanah Laut tahun 2022 lebih tinggi 54,63% dari Kab. Penajam Paser Utara). Persentase Tingkat Kemandirian Fiskal Kab. Tanah Laut yang lebih baik dari Kab. Penajam Paser Utara ini menunjukkan kesadaran masyarakatnya yang lebih baik.

Tabel 3.10
Tabel Perbandingan Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut dengan Kab. Penajam Paser Utara

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi %
2022 Kab. Tala	193.890.015.753,87	2.382.417.092.565,27	8,98
2022 Kab. PPU	125.386.713.912,32	1.757.844.430.423,32	7,13

12. Eselon III

a. Sasaran Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan (P3)

Ada 3 kinerja utama yang diemban Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan yang memiliki 3 Indikator Kinerja. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Bidang P3 memiliki 2 Kepala Sub Bidang, 1 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), 4 Jabatan Fungsional Umum (JFU), 2 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan anggaran Rp 575.075.657, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 422.155.350 (73,41%). Berikut ini, indikator kinerjanya, targetnya, serta realisasinya:

Tabel 3.11
Tabel Target dan Realisasi Sasaran Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100%	123,25%	123,25%
2.	Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100%	106,84%	106,84%
3.	Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	2,30%	1,37%	59,57%

Indikator 1 : Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB

Penerimaan Pajak Daerah (yang dimaksud disini adalah PBB-P2 dan BPHTB sesuai Renstra 2018-2023) sebesar Rp 11.706.764.762,00, sedangkan targetnya Rp 9.500.000.000,00. Sehingga realisasinya sebesar $11.709.286.562 / 9.500.000.000 \times 100 = 123,25\%$.

Tabel 3.12
Tabel Target dan Realisasi PBB-P2 & BPHTB

Tahun	Target PBB-P2 & BPHTB (Rp)	Realisasi PBB-P2 & BPHTB (Rp)	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	13.300.000.000	17.311.506.549	100	130,16	130,16
2020	11.420.000.000	15.643.122.777	100	136,98	136,98
2021	13,700.000.000	15.018.389.427	100	109,62	109,62
2022	9.500.000.000	11.709.286.562	100	123,25	123,25

Upaya yang dilakukan seperti pemberian sanksi pada ASN di lingkup Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut jika menunggak, serta Pelayanan PBB-P2 pada acara Manunggal Kabupaten Tanah Laut dapat memiliki pengaruh terhadap capaian 123,25% ini.

Secara persentase, realisasi tahun 2022 lebih tinggi dari 2021. Namun jika dilihat dari target maupun realisasi, tahun 2022 menurun dari 2021. Hal ini dikarenakan menurunnya transaksi penjualan tanah dan bangunan di tahun 2022 terutama pada pemberian Hak Baru, sehingga menyebabkan realisasi BPHTB tahun 2022 sebesar Rp. 6.460.243.716 lebih rendah 32,90% dari realisasi Rp. 9.628.148.278 di tahun 2021. Hal ini dikarenakan masyarakat masih pada masa pemulihan pasca COVID-19 sehingga bisnis yang berhubungan transaksi pemberian Hak Baru menurun. Sedangkan realisasi PBB-P2 tahun 2022 sebesar Rp 5.249.042.846 menurun cukup kecil 2,61% dari Rp 5.390.241.149 di tahun 2021. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 cukup baik walaupun penurunan terjadi karena dampak COVID-19. Bidang P3 sudah mengupayakan pemaksimalan realisasi PBB-P2 dengan melakukan pengiriman surat tagihan PBB-P2 kepada pemilik Tanah dan Bangunan yang berada diluar Kabupaten Tanah Laut, serta melakukan kunjungan ke Kantor-Kantor Desa sebagai mitra kerja dalam merealisasikan PBB-P2. Selain itu, Bidang P3 rutin mengikuti kegiatan Manunggal Kabupaten Tanah Laut bertemu masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai PBB-P2 dan BPHTB.

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk memaksimalkan kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB yaitu berkoordinasi dengan Bidang P2D mengenai data-data wajib Pajak PBB-P3 dan BPHTB yang belum melakukan pembayaran sehingga Bidang P3 dapat melakukan peningkatan pengawasan/pengendalian dan penagihan kepada wajib pajak.

Indikator 2 : Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)

Realisasi Pajak Daerah tahun (kecuali PBB-P2 dan BPHTB) sebesar Rp 33.651.332.817,00 terhadap target pendapatan Rp 31.500.250.000,00 atau sebesar 106,83%. Ini melebihi target Renstra 2018-2023 sebesar 100%.

Tabel 3.13
Tabel Target dan Realisasi Pajak Daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)

Tahun	Target Pajak Daerah (Non PBB-P2 & BPHTB) (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Non PBB-P2 & BPHTB) (Rp)	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	24.283.000.000	29.379.040.316	100	120,99	120,99
2020	21.026.150.000	28.934.560.827	100	137,61	137,61
2021	27.915.000.000	28.620.033.229	100	102,53	102,53
2022	31.500.250.000	33.654.153.664	100	106,84	106,84

Realisasi Pajak Daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB) di tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi sebesar Rp 5.031.299.588 (17,58%) dari tahun 2021. Hal ini dikarenakan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah, serta Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami peningkatan semua, kecuali Pajak Sarang Burung Walet yang menurun dibanding tahun 2021. Pajak Sarang Burung Walet turun sebesar Rp 18.274.500 (19,57%) dari tahun 2021, tetapi terjadi peningkatan yang sangat besar dibanding tahun 2021, seperti Pajak Penerangan Jalan Rp 3.869.957.700 (18,37%), Pajak Restoran Rp 518.066.215 (12,12%), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 325.687.287 (24,95%). Sedangkan Pajak Daerah yang mengalami peningkatan sangat besar secara persentase ada pada Pajak Parkir sebesar 214,42% (Rp 80.731.800).

Penurunan Pajak Sarang Burung Walet disebabkan hasil panen yang tidak dapat dipastikan, serta menurunnya hasil panen petani sarang burung walet, sehingga sulit untuk Bidang P3 untuk meningkatkan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet. Peningkatan Pajak Penerangan Jalan dikarenakan kenaikan Tarif Dasar Listrik di bulan Juli 2022, selain itu penyebab lainnya yaitu peningkatan konsumsi listrik oleh masyarakat. Peningkatan Pajak

Restoran dikarenakan pada masa pemulihan dampak COVID-19 (*New Normal*), rumah makan dan restoran yang ada di Kabupaten Tanah Laut mulai ramai dikunjungi pembeli, sehingga Bidang P3 rutin berkeliling melakukan pengawasan, pengendalian dan penagihan untuk merealisasikan pendapatan pajak restoran. Selain itu, peningkatan Pajak Restoran dikarenakan koordinasi Bidang P2D dengan Bidang P3 dalam pemasangan Tapping Box di banyak rumah makan. Peningkatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) disebabkan keberhasilan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Surat Edaran Bupati Tanah Nomor 970/1413/Bapenda/IX/2018 mengenai Kepala SKPD yang mempunyai kegiatan fisik yang sumber dananya dari APBD dan APBN agar mensyaratkan kepada kontraktor/pihak pelaksana pekerjaan fisik untuk melampirkan bukti tanda bayar Pajak MBLB dalam pencairan SP2D, dan juga keberhasilan Bidang P3 dalam melakukan pengawasan dan penagihan kepada para kontraktor/pihak pelaksana. Peningkatan Pajak Parkir dikarenakan keberhasilan Bidang P2D dan P3 melakukan intensifikasi Wajib Pajak Parkir Retail di bulan Oktober. Bidang P3 rutin mengikuti kegiatan Manunggal Kabupaten Tanah Laut bertemu masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai Pajak Daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB).

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk memaksimalkan kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) yakni berkoordinasi dengan Bidang P2D mengenai data-data wajib Pajak PBB-P3 dan BPHTB yang belum melakukan pembayaran sehingga Bidang P3 dapat melakukan peningkatan pengawasan/pengendalian dan penagihan kepada wajib pajak.

Indikator 3 : Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2

Penerimaan dari tunggakan PBB-P2 pada tahun 2022 sebesar Rp 3.490.348,00, sedangkan targetnya menyesuaikan dari daftar piutang pajak tahun 2022 senilai Rp 255.230.765,00. Penerimaan ini dari tunggakan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2004 - 2021). Secara persentase tunggakan Pajak Daerah yang terealisasi $3.490.348/255.230.765 \times 100 = 1,37\%$. Pencapaian ini masih dibawah target tahun 2022 sebesar 2,30%. Artinya tunggakan PBB-P2 yang dapat ditagih sebesar 1,37%.

Tabel 3.14
Tabel Target dan Realisasi tunggakan PBB-P2 yang tertagih

Tahun	Target tunggakan PBB-P2 yang tertagih (Rp)	Realisasi tunggakan PBB-P2 yang tertagih (Rp)	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	15.150.417.013	1.291.708.727	3,30	8,53	258,36
2020	15.291.203.350	2.221.868.654	3,30	14,53	440,31
2021	16.309.426.319	2.105.934.131	2,60	12,91	496,63
2022	255.230.765	3.490.348	2,30	1,37	59,46

Realisasi tahun 2022 1,37% terhadap target 2,30% atau dengan capaian 59,46% ini dibantu dengan program pengampunan pajak dan diskon 57% yang disusun Bidang Pengelolaan Pajak Daerah untuk memperingati Ulang Tahun Kabupaten Tanah Laut ke-57. Bidang P3 mengupayakan pemaksimalan realisasi tunggakan PBB-P2 yang tertagih dengan melakukan pengiriman surat tagihan PBB-P2 kepada pemilik Tanah dan Bangunan yang berada diluar Kabupaten Tanah Laut, serta melakukan kunjungan ke Kantor-Kantor Desa sebagai mitra kerja dalam merealisasikan PBB-P2.

Menurunnya persentase pendapatan dari PBB-P2 & BPHTB, serta tunggakan PBB-P2 menunjukkan masyarakat yang kurang memperhatikan pembayaran pajak yang berhubungan dengan properti. Namun masyarakat fokus untuk mengembangkan bisnisnya pada saat *New Normal* sehingga berdampak pada 8 jenis Pajak Daerah lainnya meningkat.

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk mengurangi tunggakan PBB-P2 yakni berkoordinasi dengan Bidang P2D mengenai data-data wajib Pajak PBB-P3 yang menunggak sehingga Bidang P3 dapat melakukan peningkatan penagihan kepada wajib pajak baik secara *door to door* ataupun melakukan pengiriman surat tagihan bagi Wajib Pajak yang tidak berdomisili di Tanah Laut.

3.1.1 Sasaran Eselon IV Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Tabel 3.15
Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	1.	Jumlah Laporan	3	3	100%
		Hasil Rekonsiliasi	Dokumen	Dokumen	
		Penerimaan Dari BPHTB			

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	2. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Piutang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah sudah melaksanakan tugas sesuai targetnya, dimana Jumlah laporan hasil rekonsiliasi penerimaan dari BPHTB 3 Dokumen dan Jumlah laporan realisasi penerimaan piutang 1 Dokumen sudah diselesaikan di tahun 2022. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang sebagai Plt. Kasubbid Penagihan Pajak Daerah dibantu 1 orang JFT, 1 orang JFU, dan 1 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dengan anggaran sebesar Rp 540.295.657 yang terealisasi sebesar Rp 391.751.600 (72,51%). Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah aktif melakukan penagihan untuk merealisasikan 11 jenis Pajak Daerah.

3.1.2 Sasaran Eselon IV Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah

Tabel 3.16

Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah sudah melaksanakan tugas sesuai targetnya, dimana Jumlah dokumen hasil pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan pajak daerah sebanyak 1 Dokumen sudah dibuat di tahun 2022. Sub Bidang ini untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbid Penagihan Pajak Daerah dibantu 1 orang JFT, 3 orang JFU, dan 1 orang PTT dengan anggaran sebesar Rp 34.780.000 yang terealisasi sebesar Rp 30.403.750 (87,42%). Sub Bidang ini aktif melakukan pemeriksaan, monitoring dan monitoring terhadap objek pajak dari 11 jenis Pajak Daerah agar target bisa terealisasi.

3.2 Sasaran Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah (P2D)

Ada 3 sasaran program yang menjadi Kinerja Utama dari Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, dimana 3 Kinerja Utama ini memiliki masing-masing 1 Indikator Kinerja (3 Indikator Kinerja). Untuk memenuhi

target dari indikator kinerja ini, Kepala Bidang P2D memiliki 2 Kepala Sub Bidang, 1 JFT, 2 JFU, 7 PTT dengan anggaran Rp 965.311.559, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 540.916.270 (56,04%). Berikut ini, Indikator Kinerjanya beserta targetnya:

Tabel 3.17
Tabel Target dan Realisasi Sasaran Kabid Pengelolaan Pajak Daerah

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	6%	5,27%	112,17%
2.	Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100%	100%	100%
3.	Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100%	100%	100%

Indikator 1 : Persentase penurunan data Pajak Daerah yang tidak valid

Valid yang dimaksud disini adalah validasi data PBB-P2 bagi wajib pajak yang sebelumnya akan didata/diverifikasi terlebih dahulu kelengkapan administrasinya, agar data yang disampaikan lengkap sesuai dengan persyaratan yang ada. Tidak validnya data seperti nama/alamat wajib pajak yang keliru (berbeda nama/alamatnya dengan nama di KTP, luas tanah yang salah/tidak sesuai dengan ukuran), dan lain-lainnya, sehingga tidak bisa diproses untuk dihitung dan ditetapkan hingga terbitnya SPPT bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Tabel 3.18
Tabel Target dan Realisasi Data Wajib yang tidak Valid

Tahun	Data Wajib Pajak	Data Wajib Pajak yang tidak Valid	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	16.050	27	12	0,17	198,60
2020	9.500	1.039	10	10,94	90,63
2021	38.000	7.949	8	20,92	-61,48
2022	134.322	7.080	6	5,27	112,17

Perolehan realisasi yang didapat hingga akhir tahun 2022, terdapat 7.080 data Wajib Pajak yang tidak valid dari 134.322 Wajib Pajak. Secara persentase, data wajib pajak yang tidak valid sebesar $7.080/134.322 \times 100 = 5,27\%$. Realisasi ini lebih rendah dari target sebesar 6%. Sehingga dapat dikatakan validasi data wajib pajak yang dikerjakan Bidang P2D berhasil

melebihi target 2022 atau dengan capaian 112,17%. Jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 20,92%, realisasi tahun 2022 lebih baik. Hal ini dikarenakan data wajib pajak lebih banyak dari tahun 2021. Selain upaya pemutakhiran data pajak PBB-P2 yang dilakukan Bidang P2D di Kecamatan Panyimpitan dapat dikatakan berhasil.

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemutakhiran data PBB-P2 di Kecamatan Bati-Bati. Kegiatan pemutakhiran ini sudah dilakukan dari 2019. Adapun kecamatan yang sudah dilakukan pemutakhiran data PBB-P2 Kecamatan Bajuin, Tambang Ulang, Batu Ampar, Takisung, dan Panyampitan. Sedangkan Kecamatan yang belum dilakukan pemutakhiran dan akan dimutakhirkan ke depan yaitu Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, Jorong, Kintap, dan Pelaihari.

Indikator 2 : Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah

Tabel 3.19
Tabel Target dan Realisasi Potensi Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	11 Jenis Pajak Terealisasi	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	Ya	100	100	100
2020	Ya	100	100	100
2021	Ya	100	100	100
2022	Ya	100	100	100

Realisasi 11 Jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, dan BPHTB, terhadap target tahun 2022 yang sudah ditetapkan dapat direalisasikan **100%** semua, sehingga dapat dikatakan 11 jenis Pajak Daerah ini dapat dijadikan potensi pendapatan Pajak Daerah.

Bidang P2D dalam realisasi 11 Jenis Pajak Daerah ini kembali mengulangi capaian tahun sebelumnya. Walaupun selalu bisa mengulangi capaian sebelumnya, tetapi masih ada potensi jenis pajak tidak terealisasi, seperti Pajak Sarang Burung Walet. Hal ini dikarenakan sulitnya memprediksi kapan sarang burung walet diprediksi.

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 yaitu berkoordinasi dengan Bidang P3 agar potensi dari 11 Pajak Daerah tetap dapat bisa tertagih. Bidang P2D mengolah data wajib pajak mana saja yang belum membayar dan diserahkan kepada Bidang P3 untuk penagihan dan pengawasan.

Selain itu, Bidang P2D membuat program keringanan biaya pembayaran PBB-P2 untuk memperingati HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

Indikator 3 : Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah

Tabel 3.20
Tabel Target dan Realisasi Penetapan Wajib Pajak

Tahun	Target Penetapan (Ketetapan)	Realisasi Penetapan (Ketetapan)	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	3.000	3.916	100	130,53	130,53
2020	3.200	9.456	100	295,50	295,50
2021	2.000	13.209	100	660,45	660,45
2022	2.000	2.000	100	100,00	100,00

Target penetapan wajib pajak pada tahun 2022 sebesar 2.000 Ketetapan. Realisasi pada tahun 2022 ini sesuai target 100%, sehingga dapat dikatakan jumlah wajib pajak yang akan melaksanakan kewajibannya untuk dibuatkan perhitungan dan penetapan dari pajak daerah yang akan dibayarnya sesuai dengan harapan di tahun 2022.

Pada Tahun 2023 nanti ditarget 131.000 penetapan wajib pajak. Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk yaitu dengan melakukan cetak massal ketetapan pada bulan Mei 2023. Ketetapan yang dicetak massal ini adalah ketetapan PBB-P2, Pajak Air Bawah Tanah, dan Reklame.

3.2.1 Sasaran Eselon IV Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Tabel 3.21
Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1. Jumlah dokumen objek pajak daerah yang didata / diverifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1. Jumlah data PBB-P2 yang berhasil divalidasi dan diverifikasi	9950 Objek Pajak	9950 Objek Pajak	100%
	2. Jumlah penyelesaian keberatan PBB-P2 dan BPHTB yang difasilitasi	50 Objek Pajak	50 Objek Pajak	100%
	3. Jumlah petugas pendata	12 Orang	12 Orang	100%

Kinerja Utama	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.	Jumlah penetapan Wajib Pajak Daerah dan penetapan pajak daerah	2.000 Ketetapan	2.000 Ketetapan	100%

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mengemban 3 Kinerja Utama. Pada Tahun 2022, Indikator dari 3 Kinerja Utama sudah dilaksanakan sesuai targetnya, dimana Target dan Realisasinya sama. Sub Bidang ini untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dibantu 1 orang JFT, 1 orang JFU, dan 3 orang PTT dengan anggaran sebesar Rp 775.294.203 yang terealisasi sebesar Rp 397.711.270 (51,30%). Sub Bidang ini aktif melakukan pendataan, pendaftaran, dan penetapan terhadap wajib pajak, serta pengolahan basis data dari 11 jenis Pajak Daerah agar target bisa terealisasi.

3.2.2 Sasaran Eselon IV Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Tabel 3.22
Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.	Jumlah layanan SPPT PBB-P2 yang tersampaikan	132.000 SPT	132.000 SPT	100%
	2.	Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi	1.000 SPPD	1.000 SPPD	100%
	3.	Jumlah Wajib Pajak yang melakukan konsultasi tentang PBB dan BPHTB	215 Wajib Pajak	215 Wajib Pajak	100%

Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah sudah melaksanakan tugas sesuai targetnya di tahun 2022, dimana 3 Realisasi sesuai dengan 3 Target dari 3 Indikator. Sub Bidang ini untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbid Pelayanan Pajak Daerah dibantu 1 orang JFU, dan 4 orang PTT dengan anggaran sebesar Rp 190.017.356 yang terealisasi sebesar Rp 143.205.000 (75,36%). Sub Bidang ini aktif melakukan pelayanan terhadap wajib pajak dari 11 jenis Pajak Daerah agar target bisa terealisasi.

3.3 Sasaran Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan

Ada 2 sasaran yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan yang memiliki 3 Indikator Kinerja. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Bidang memiliki 2 Kepala Sub Bidang, dan 2 JFU dengan anggaran Rp 136.343.245, dimana anggaran yang terealisasi Rp 81.676.344 (59,90%). Berikut ini, Indikator Kinerjanya beserta targetnya:

Tabel 3.23
Tabel Target dan Realisasi Sasaran Kabid Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1. Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	5,00%	48,86%	977,20%
2.	Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1. Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	4,50%	48,98%	1088,42%
		2. Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi daerah	0,76%	21,39%	2814,44%

Indikator 1 (Sasaran 1): Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah

Tabel 3.24
Tabel Target dan Realisasi PLL & Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi PLL dan Retribusi	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	1.763.158.818.719,69	5,00	24	475
2020	1.561.776.032.854,77	5,00	-11	-228
2021	1.332.345.590.034,00	5,00	-15	-294
2022	2.213.613.693.514,00	5,00	48,86	977,20

Pendapatan lain-lain yang dimaksud disini adalah jumlah dari Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi yang dicapai pada Indikator ini sebesar **66,16%** dari target 5,00%. Pencapaian yang tinggi ini dikarenakan Transfer Pemerintah Pusat yang meningkat 71,30% dari tahun 2021, walaupun Retribusi Daerah terealisasi di 87,50% karena tidak tercapainya target Retribusi Jasa Usaha dan IMB. Adapun Perhitungannya sebagai berikut :

Real. Pendapatan Transfer 2022 : Rp 1.963.205.983.275,00
 Real Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah 2022: Rp 2.143.662.071,00
 Real. Hasil Pengelolaan Kekayaan DyD 2022 : Rp 11.010.810.384,00+
 Real. Pendapatan Lain-lain (PLL) 2022 : Rp 1.976.360.455.730,00
 Realisasi Retribusi 2022 : Rp 6.971.598.007,00
 Realisasi PLL dan Retribusi 2022 : Rp 1.983.332.053.737,00
 Realisasi PLL dan Retribusi 2021 : Rp 1.332.345.590.034,80

$$\begin{aligned} \text{Realisasi 2022} &= (\text{Real. PLL \& Retribusi 2022} - \text{Real. PLL \& Retribusi} \\ &\quad \text{2021}) / \text{Real. PLL \& Retribusi 2021} \times 100 \\ &= (1.983.332.053.737,00 - 1.332.345.590.034,80) / \\ &\quad 1.332.345.590.034,80 \times 100 = 48,86\% \end{aligned}$$

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah yaitu berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel terkait DBH, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan terkait Pendaptan Transfer, dan berkoordinasi dengan seluruh SKPD pengelola retribusi untuk penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Indikator 1 (Sasaran 2): Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah

Tabel 3.25
Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain

Tahun	Realisasi PLL	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	1.753.867.593.305,69	10,89	23,71	218
2020	1.554.259.421.787,77	4,32	-11,38	-263
2021	1.326.602.436.506,00	4,54	-14,65	-323
2022	1.976.360.455.730,00	4,50	48,98	1088,42

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah disini maksudnya Pendapatan Lain-lain seperti penjelasan pada indikator sebelumnya. Realisasi Pendapatan lain-lain tahun 2021 sebesar Rp 1.326.602.436.506,00, sedangkan tahun 2022 sebesar 1.976.360.455.730,00, sehingga dapat dikatakan realisasi Penerimaan lain-lain pendapatan daerah tahun 2022 **meningkat 48,98%** dari tahun 2021, serta melebihi target tahun 2022 sebesar 4,50%. Hal ini dikarenakan alasan yang sama dengan indikator sebelumnya, yakni meningkatnya Transfer Pemerintah Pusat yang sebesar 51,69%.

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yaitu melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terkait DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Provinsi, dan Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan terkait Pendaptan Transfer dari Pemerintah Pusat, serta melakukan pendekatan persuasif kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk mengajak berkontribusi pada pembangunan daerah dalam bentuk hibah / sumbangan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak memaksa dengan persetujuan Bupati.

Indikator 2 (Sasaran 2) : Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi daerah

Tabel 3.26
Tabel Target dan Realisasi Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	9.291.225.414,00	1,15	31,56	2744,18
2020	7.516.611.067,00	1,22	-19,10	-1565,57
2021	5.743.153.529,80	0,96	-23,59	-2457,69
2022	6.971.598.007,00	0,76	21,39	2814,44

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp 6.971.598.007,00 dari target 2022 sebesar Rp 7.952.619.500,00, artinya realisasi tahun 2022 terhadap target sebesar 87,66%. Hal ini dikarenakan Retribusi Jasa Usaha yang terealisasi 85,92%, dan Retribusi IMB yang terealisasi 65,91% atau tidak mencapai target. Walaupun tidak sesuai target 2022, Realisasi tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar Rp 5.743.153.529,80. Artinya terjadi **pertumbuhan** penerimaan lain-lain pendapatan daerah sebesar **21,39%** dari tahun 2021.

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah yaitu berkoordinasi dengan Seluruh SKPD yang mengelola Retribusi untuk melakukan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dengan langkah awal menggunakan QRIS. Hal ini juga menjadi upaya Badan Pendapatan Daerah untuk menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2019 Pasal 222 yang berisikan kewajiban Pemda untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah.

3.3.1 Sasaran Eselon IV Sub Bidang Retribusi Daerah

Tabel 3.27
Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Retribusi Daerah

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. Jumlah pendapatan dari retribusi daerah di tahun berjalan	Rp 7.088.334.000	Rp 6.958.536.407	99,08%
	2. Jumlah SKPD penghasil pendapatan yang dimonev	25 SKPD	25 SKPD	100%

Indikator dari kinerja utama ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta koordinasi dengan SKPD dengan penerimaan retribusi daerah yang kegiatannya meningkatkan PAD. Ada 2 target Indikator, dimana 1 Indikator terpenuhi, sedang Indikator Jumlah pendapatan dari retribusi daerah di tahun berjalan terealisasi 99,08%, yang dikarenakan tidak tercapainya target Retribusi Jasa Usaha, dan IMB.

Sub Bidang ini untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbid Retribusi Daerah dibantu 1 orang JFU dengan anggaran sebesar Rp 50.003.135 yang terealisasi sebesar Rp 43.680.000 (87,35%). Sub Bidang ini aktif melakukan koordinasi dengan SKPD penghasil retribusi daerah agar target bisa terealisasi sehingga dapat meningkatkan PAD.

3.3.2 Sasaran Eselon IV Sub Bidang Pendapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan

Tabel 3.28
Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Pendapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	2. Jumlah kegiatan terkait data penerimaan pendapatan daerah di tahun berjalan	4 Kali / Laporan	4 Kali / Laporan	100%

Kinerja Utama	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.	Jumlah dokumen hasil penelitian dan verifikasi keakuratan data pelaporan pendapatan daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Sub Bidang Pendapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan mengemban 2 sub kegiatan dengan total 3 Indikator. Semua target dari indikator sudah dilaksanakan di tahun 2022.

Sub Bidang ini untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbid Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan dibantu 1 orang JFT dan 1 orang JFU dengan anggaran sebesar Rp 86.340.110 yang terealisasi sebesar Rp 37.996.344 (44,01%). Sub Bidang ini aktif melakukan perencanaan pendapatan daerah serta koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar target bisa terealisasi sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

3.4 Sasaran Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Ada 1 Sasaran Strategis yang menjadi Kinerja Utama dengan 5 Indikator Kinerja yang diemban oleh Sekretaris. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Sekretaris memiliki 2 Kepala Sub Bagian, 4 JFU, dan 3 PTT dengan anggaran Rp 9.091.549.816, dimana anggaran yang terealisasi Rp 8.205.915.076 (90,26%). Berikut ini, Indikator Kinerjanya beserta targetnya:

Tabel 3.29
Tabel Target dan Realisasi Sasaran Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1.	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	80 (B)	84,72 (A)	105,90%
	2.	Nilai Hasil Evaluasi RB	77 (BB)	64,15 (B)	83,31%
	3.	Nilai Hasil Evaluasi ZI	77 (BB)	85,77 (A)	111,39%
	4.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77 (BB)	77,2 (BB)	100,26%
	5.	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Indikator 1 : Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah

Tabel 3.30
Tabel Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Sekretariat Bapenda

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2019	77 (B)	77,00 (B)	100,00
2020	78 (B)	88,76 (A)	113,79
2021	79 (B)	81,07 (B)	102,62
2022	80 (B)	84,72 (A)	105,90

Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah disini adalah nilai kepuasan internal Badan Pendapatan Daerah terhadap Sekretariat dalam menyelenggarakan urusan kesekretariatan. Pada tahun 2022 ini, nilai yang diperoleh sebesar 84,72 atau kategori A, ini lebih tinggi dari target nilai B.

Nilai A yang diperoleh Sekretariat ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, baik dalam kinerja umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Pelaksanaan tupoksi dengan sungguh-sungguh di Sekretariat sehingga dapat mencapai nilai A ini. Perolehan ini meningkat dibandingkan 2021, yang kemungkinan disebabkan mulai lancarnya kegiatan sekretariat setelah masa pandemi COVID-19.

Rencana Aksi yang dilakukan Sekretariat untuk Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 yaitu melakukan pembahasan/pengkajian untuk merevisi SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) yang baru, serta rehabilitasi ruangan rapat di Badan Pendapatan Daerah agar penerimaan tamu dan pelaksanaan rapat dapat lebih memadai.

Indikator 2 : Nilai Hasil Evaluasi RB (Reformasi Birokrasi)

Tabel 3.31
Tabel Target dan Realisasi Reformasi Birokrasi

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2019	74 (BB)	-	-
2020	75 (BB)	76,00 (BB)	101,3
2021	76 (BB)	73,74 (BB)	97,03
2022	77 (BB)	64,15 (B)	83,31

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilihat dari akumulasi pemenuhan 8 Area Perubahan dalam 2 Aspek, yakni Aspek Pemenuhan, dan Aspek Reform. 8 Area Perubahan ini terdiri dari :

- a. Manajemen Perubahan
- b. Deregulasi Kebijakan
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi

- d. Penataan Tata Laksana
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM
- f. Penguatan Akuntabilitas
- g. Penguatan Pengawasan,
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2021 untuk nilai 2022 berhasil pada 64,15% atau dalam kategori B. Nilai ini diperoleh dengan rincian pada Aspek Pemenuhan sebesar 50,95% dan Aspek Reformasi sebesar 73,03%. Sehingga diperoleh 64,15% (B). Nilai ini lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan kurangnya nilai pada Area Perubahan Deregulasi Kebijakan yang mendapatnya nilai 0.

Adapun rencana aksi ke depan untuk perbaikan pada masing-masing area perubahan yaitu:

- a. Komponen Pemenuhan
 - 1. Manajemen Perubahan
 - Meningkatkan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan
 - Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut
 - Melakukan penyimpanan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan lebih rapi sehingga pada saat pelaksanaan penilaian tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi dokumen penilaian.
 - Melaksanakan sosialisasi Road Map / Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah kepada seluruh anggota unit organisasi.
 - Menyelaraskan rencana kerja Reformasi Birokrasi dengan Road Map
 - Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh tim RB untuk menentukan nilai RB per area yang akan dicapai.
 - 2. Deregulasi Kebijakan
 - Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis / sinkron / bersifat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- Menindaklanjuti hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis / sinkron / bersifat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan revisi atas kebijakan yang tidak harmonis / sinkron / bersifat menghambat tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
- Melakukan evaluasi kelembagaan terhadap ketetapan fungsi dan ketetapan ukuran organisasi, evaluasi yang mengukur jenjang organisasi, evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi, evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan, evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja di atasnya, evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan, evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan, evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan, dan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
 - Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi dengan mengajukan usulan perubahan/penyederhanaan organisasi.
4. Penataan Tata Laksana
- Melakukan penjabaran peta lintas fungsi (dengan unit/SKPD lain) ke dalam SOP
 - Melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
- Menyelaraskan Analisis jabatan, analisis beban kerja dengan kinerja utama;

- Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai.
6. Penguatan Akuntabilitas
- Melibatkan pimpinan unit kerja secara langsung pada saat penyusunan Renstra;
 - Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja terhadap seluruh pegawai yang menanganinya.
7. Penguatan Pengawasan,
- Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian intern;
 - Melaksanakan onitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan perbaikan dalam penerapan SPI.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengaduan masyarakat
 - Membuat laporan hasil evaluasi terhadap tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.
 - Mensosialisasikan whistle blowing system kepada seluruh pegawai.
 - Mensosialisasikan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai.
 - Melakukan monitoring secara berkala atas benturan kepentingan;
 - Melakukan tindaklanjut atas hasil evaluasi atas benturan kepentingan;
 - Melakukan evaluasi secara berkala atas pembangunan zona integritas.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholders (antara lain: tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat;
 - Melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga

seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan;

- Memastikan bahwa seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional;
- Meningkatkan inovasi pelayanan sehingga mendapatkan pengakuan secara nasional dan/atau internasional;
- Melakukan evaluasi secara berkala atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi;
- Melaksanakan survei kepuasan masyarakat minimal 4 kali dalam setahun;
- Memastikan bahwa Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline;
- Melakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat;
- Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.

Indikator 3 : Nilai Hasil Evaluasi ZI (Zona Integritas)

Tabel 3.32
Tabel Target dan Realisasi Zona Integritas

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2019	74 (BB)	-	-
2020	75 (BB)	53 (C)	70,67
2021	76 (BB)	-	-
2022	77 (BB)	85,77 (A)	111,4

Evaluasi Zona Integritas (ZI) dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan masukan kepada pimpinan tentang kualitas pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan pada SKPD yang telah dicanangkan. Ruang lingkup evaluasi pembangunan Zona Integritas pada SKPD yang telah dicanangkan yaitu :

- a. Pemenuhan dokumen atas hasil yang dicapai pada Dokumen Pengungkit, Reform, dan Komponen Hasil sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Zona Integritas
- b. Memastikan hal-hal terkait pencapaian kinerja, yaitu :
 1. Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK
 2. Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP

3. Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN/LHKASN
4. Komitmen dan pemahaman pimpinan serta seluruh pegawai terkait pembangunan Zona Integritas
5. Kualitas Implementasi dan komponen pengungkit serta data dukung implementasinya
6. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan
7. Penilaian hasil survey yang diperoleh
8. Tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi Zona Integritas (ZI) tahun 2021 untuk nilai 2022 dengan target nilai BB, berhasil di angka **85,77** atau kategori **A**, sehingga melampaui target. Nilai 85,77 ini adalah simpulan yang terdiri dari Komponen Pengungkit 23,61, Komponen Pemenuhan Reform 26,51, dan Komponen Hasil 35,65. Perolehan nilai ini jauh lebih baik dibanding tahun 2021 yang belum mendapatkan nilai dari KemenPAN-RB karena belum memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai. Bahkan perolehan tahun 2022 lebih baik dari tahun 2020, dimana pada tahun 2020 hanya memperoleh nilai 53 atau pada kategori C.

Badan Pendapatan Daerah masih belum layak diusulkan untuk diajukan evaluasi ke TIM Penilai Nasional (TPN) karena masih terdapat Rekomendasi BPK yang belum selesai, yaitu dari temuan sebanyak 5 buah telah ditindaklanjuti sebanyak 4 buah, sisanya 1 buah 20% belum selesai. Selain itu, Rekomendasi BPKP sebanyak 11 buah belum ditindaklanjuti atau 0%. Pelaksanaan survey pelayanan masyarakat belum dilakukan secara berkala.

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan ke depan yaitu :

- a. Tetap berkomitmen dalam membangun Zona Integritas dan lebih meningkatkan kinerja, sehingga nilai dapat ditingkatkan dan dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh TPN.
- b. Meningkatkan nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah agar dapat berdampak pada peningkatan pada nilai SAKIP Kabupaten, sehingga SKPD yang telah mendapat predikat WBK dapat mempertahankan dan dapat ditingkatkan untuk mendapatkan predikat WBBM.
- c. Menindaklanjuti temuan yang ditemukan BPK ataupun BPKP sampai selesai
- d. Melaksanakan survey pelayanan masyarakat secara berkala.

Indikator 4 : Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Tabel 3.33

Tabel Target dan Realisasi Hasil Evaluasi SAKIP

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2019	74 (BB)	67,63 (B)	91,39
2020	75 (BB)	77,31 (BB)	103,08
2021	76 (BB)	83,11 (A)	109,36
2022	77 (BB)	77,2 (BB)	100,26

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA & DPA, Perjanjian Kinerja & IKU, Pohon Kinerja, Laporan Kinerja, Dokumen perencanaan teknis di SKPD, serta Dokumen lain yang mendukung.

Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021 untuk Nilai tahun 2022 dengan target nilai BB berhasil di angka 77,2 atau kategori BB (Sangat Baik). Hal ini ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Nilai tersebut merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depan untuk perbaikan selanjutnya, yaitu

- a. Perencanaan Kinerja
 - Agar melakukan monitoring dan tindak lanjut atas rencana aksi kinerja secara berkala sehingga dapat berjalan dinamis
- b. Pengukuran Kinerja
 - Hasil monitoring terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala agar dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
 - Menginformasikan perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)
 - Dilakukan review secara berjenjang dengan membuat laporan hasil revidu
 - Dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel Kabupaten/ Provinsi/ Nasional (bila ada)

- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara berkala
 - Agar monitoring, Evaluasi dan pemantauan terhadap rencana aksi pencapaian kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja
 - Agar rekomendaasi hasil Evaluasi APIP ditindaklanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Indikator 5 : Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

Tabel 3.34
Tabel Target dan Realisasi Tidaklanjut Temuan BPK

Tahun	Jumlah Temuan	Tindak lanjut	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	-	-	100	100	100
2020	-	-	100	100	100
2021	-	-	100	100	100
2022	5	5	100	100	100

Ada 5 Temuan pada kinerja tahun 2021 yang ditemukan BPK di tahun 2022, yang mana sudah ditindaklanjuti semua, sehingga dapat dikatakan 100% ditindaklanjuti. Namun, untuk penyelesaian tindaklanjut, 4 dari 5 temuan sudah diselesai, sisa 1 temuan lagi. Adapun 5 temuan tersebut, yaitu:

- Penetapan Pajak Hotel dan Restoran tidak sesuai ketentuan dan pemungutan Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum optimal berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2012
- Penatausahaan atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum optimal berdasarkan Laporan Keuangan 2013
- Penyajian Nilai Pendapatan Pajak E Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PZ), Pendapatan Denda PBB-P2 dan Piutang PEB-P2 Belum Didukung dengan Data yang Memadai dari Aplikasi SIM PBB tahun
- Pengelolaan Pajak Sarang Burung BP Walet Belum Optimal
- Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Sepenuhnya Tertib

Rencana Aksi Sekertariat yang akan dilakukan ke depan adalah berusaha untuk menindaklanjuti semua temuan apabila ditemukan, serta berkoordinasi dengan bidang-bidang dalam menyelesaikan temuan.

3.4.1 Sasaran Eselon IV, Sub Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.35

Tabel Target dan Realisasi Sasaran Sub Umum dan Kepegawaian

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RB dan ZI	2 Laporan	2 Laporan	100%
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis	3 Orang	-	-
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	16 Jenis	14 Jenis	87,50%
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	45 Jenis	40 Jenis	90,63%
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	19 Jenis	18 Jenis	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak	8 Jenis	4 Jenis	79,49%
	Jumlah Penggandaan	19.373 Lembar	11.428 Lembar	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Harian	2 Jenis/SKH	2 Jenis/SKH	30,56%
	Jumlah Buku/Literatur Bacaan Lainnya	4 Jenis /Buku	-	
Tersedianya Bahan/Material	Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan	2 Jenis / Event	2 Jenis / Event	100%
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan	30 Kali	30 Kali	100%
	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan	5 Kali	5 Kali	

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah Tamu	150 Orang	150 Orang	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik yang Terbayar	4 Jenis Rekening	4 Jenis Rekening	100%
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	1 Jenis	1 Jenis	100%
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Asuransi Kesehatan, JKK, dan JKM Untuk 14 Orang PTT	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium 14 Orang PTT	12 Bulan	12 Bulan	
	Jumlah Bulan Pengiriman Paket/Surat/Dokumen SKPD	12 Bulan	12 Bulan	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	5 Unit	

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Roda Empat yang Dipelihara			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	100%
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara	1 Unit Gedung	1 Unit Gedung	100%
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Jenis	1 Jenis	100%

Ada 12 Kinerja Utama Kasubbag Umum & Kepegawaian dari 16 Kinerja Utama yang Capaiannya 100%. Adapun penyebab 5 Kinerja Utama tidak mencapai 100% yaitu, tidak ditemukannya pelatihan yang kredibel, komponen listrik yang tidak terealisasi karena keadaannya tidak mendesak, jenis Alat peralatan dan perlengkapan kantor yang ternyata masih cukup di tahun 2022, Barang Cetakan dan Penggandaan yang masih memadai untuk tahun 2022, dan bahan bacaan yang sudah cukup dengan pembelian 2 merk surat kabar harian.

Sub Bagian Umum & Kepegawaian untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian dibantu 1 orang JFU dan 2 orang PTT dengan anggaran sebesar Rp 1.563.982.618 yang terealisasi sebesar Rp 1.383.094.614 (88,43%).

3.4.2 Sasaran Eselon IV, Sub Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3.36
Tabel Target dan Realisasi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPAP	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAPKIN, LKPJ-LPPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan TPP ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Jumlah Bulan Pembayaran Tambahan Penghasilan Lainnya Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran / Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Akhir Tahun yang disusun Bendahara Pengeluaran SKPD	19 Laporan	19 Laporan	100%
	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mengemban 4 Kinerja Utama dengan 6 Indikator. Pembuatan dokumen perencanaan, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban, penggajian, dan laporan penatausahaan menjadi indikator target di sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ini. Semua target dari indikator sudah dilaksanakan sehingga dapat dikatakan target sudah teralisasi semua.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Perencanaan dan Keuangan dibantu 3 orang JFU dan 1 orang PTT dengan anggaran sebesar Rp 7.527.567.198 yang terealisasi sebesar Rp 6.822.820.462 (90,64%).

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran Realisasi APBD 2022

Adapun anggaran dan realisasi APBD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dapat dilihat pada ringkasan tabel berikut, yaitu :

Tabel 3.37

Tabel Anggaran Realisasi APBD 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Persentase
Pendapatan			
Total Pendapatan Daerah	1.717.636.708.676,00	2.382.417.092.565,27	138,70%
Pendapatan Asli Daerah	155.994.346.605,00	186.772.745.842,27	119,73%
Pendapatan Transfer	1.560.894.562.071,00	2.193.521.718.269,00	140,52%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	747.800.000,00	2.122.628.454,00	283,84%
Belanja			
Belanja Operasi	10.554.047.081,00	9.080.628.040,00	86,03%
Belanja Modal	214.233.196,00	170.035.000,00	79,36%

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.38
Tabel Anggaran Realisasi menurut Sasaran dan Program

Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi		10.768.280.277,00	9.250.663.040,00	85,90
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	9.091.549.816,00	8.205.915.076,00	90,25
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.676.730.461,00	1.044.747.964,00	62,31

Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022

Tabel 3.39

Tabel Anggaran Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022

No	Program / Kegiatan 2021	No	Program / Kegiatan 2022
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang sudah terelisasi pada Tahun 2022 secara ringkas, yaitu :

1. Persentase IKU Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5,94 %, dibawah target 8,00%, atau dengan capaian 74,25%
2. Persentase IKU Pertumbuhan PAD berhasil sebesar -9,39 %, dibawah target 4,12%, atau dengan capaian -227,91%
3. Persentase IKU PAD terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian Fiskal) sebesar 7,83%, dibawah target 8,63%, atau dengan capaian 90,73%
4. Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid sebesar 5,27%, lebih baik dari target 6%, atau dengan capaian 112,17%
5. Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah sebesar 100%, sesuai dengan target 100%, atau dengan capaian 100%
6. Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah sebesar 100%, sesuai dengan target 100%, atau dengan capaian 100%
7. Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB sebesar 123,23%, lebih baik dari target 100%, atau dengan capaian 123,23%
8. Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) sebesar 106,83%, lebih baik dari target 100%, atau dengan capaian 106,83%
9. Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2 sebesar 1,37%, dibawah target 2,30%, atau dengan capaian 59,57%
10. Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah sebesar 66,16%, diatas target 5%, atau dengan capaian 1323,20%
11. Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah sebesar 66,36%, diatas target 4,5%, atau dengan capaian 1474,67%
12. Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi daerah sebesar 21,16%, diatas tagert 0,76%, atau dengan capaian 2784,21%
13. Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah sebesar 84,72 (A), diatas target 80 (B), atau dengan 105,90%
14. Nilai Hasil Evaluasi RB sebesar 64,15 (B), dibawah target 77 (BB), atau dengan capaian 83,31%

15. Nilai Hasil Evaluasi ZI sebesar 85,77 (A), diatas target 77 (BB), atau dengan capaian 111,39%
16. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP sebesar 77,2 (BB), diatas target 77 (BB), atau dengan capaian 100,26%
17. Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti sebesar 100% sesuai target 100%, atau dengan capaian 100%

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi Peningkatan Kinerja yang sudah dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

1. Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Tim Kepatuhan Pajak Daerah yang terdiri dari lintas sektor dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan penertiban terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
2. Memasang alat perekam data transaksi yang berjumlah 24 unit di Rumah makan dan 1 Hotel.
3. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pajak PBB-P2 di Kecamatan Panyimpatan.
4. Melaksanakan pelayanan terkait Pajak Daerah di desa-desa mengikuti jadwal Manunggal.
5. Pemberian sanksi penundaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan Gaji Pegawai Tidak Tetap di lingkup Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut jika tidak melakukan pembayaran PPB-P2.
6. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan SKPD Penghasil Retribusi Daerah.
7. Evaluasi tarif-tarif yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi daerah
8. Melakukan revisi peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
9. Melakukan kajian-kajian potensi pajak dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah
10. Melakukan pengawasan terhadap objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah
11. Sosialisasi dan edukasi kepada para wajib pajak daerah agar taat dalam melaksanakan kewajibannya.


INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II)

- Kabupaten : Tanah Laut
 Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah
 Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintah bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
 Fungsi : a. Penyusun kebijakan teknis bidang pendapatan
 b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan
 c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan
 d. Pembinaan teknis bidang penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab / Sumber Data
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1.	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun berjalan (n)} - \text{Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut
		2.	Persentase Pertumbuhan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD tahun berjalan (n)} - \text{Realisasi PAD tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Realisasi PAD T sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut
		3.	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan (n)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah tahun berjalan (n)}} \times 100\%$ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Pelaihari, 24 Januari 2022

Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,


 Ir. AKHMAD HAIRIN, MP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 19680129 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. AKHMAD HAIRIN, MP
Jabatan : Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. SUKAMTA
Jabatan : Bupati Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

H. SUKAMTA

PIHAK PERTAMA,

Ir. AKHMAD HAIRIN, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680129 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1. Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	8
		2. Persentase Pertumbuhan PAD	4,12
		3. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,63

Program	Anggaran	Ket.
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 9.091.549.816	APBDP
2. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 1.676.730.461	APBDP
	Rp 10.768.280.277	

Pelaihari, 21 Oktober 2022

BUPATI
KABUPATEN TANAH LAUT



H. SUKAMTA

Plh. KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT



I. AKHMAD HAIRIN, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680129 199303 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan : A. Syairani, Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs, H. SURYA ARIFANI, MSi
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. SUKAMTA
Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Drs. H. SURYA ARIFANI, MSi
NIP. 19650627 199003 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1. Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	8%
		2. Persentase pertumbuhan PAD	4,12%
		3. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	8,63%

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.136.490.174,00
		1.1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	62.985.110,00
		1.2. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	103.289.705,00
		1.3. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	309.322.801,00
		1.4. Penetapan wajib pajak daerah	51.270.000,00
		1.5. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	190.017.356,00
		1.6. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	23.355.000,00
		1.7. Penagihan pajak daerah	255.717.811,00
		1.8. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	90.529.256,00
		1.9. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	50.003.135,00


 BUPATI TANAH LAUT,

 H. SUKAMTA

Pelaihari, 3 Januari 2022
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Tanah Laut,

 Drs. H. SURYA ARIFANI, MSi
 NIP. 19650627 199003 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. AKHMAD HAIRIN, MP

Jabatan : Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	80 (B)
		Nilai Hasil Evaluasi RB	77 (BB)
		Nilai Hasil Evaluasi ZI	77 (BB)
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77 (BB)
		Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.718.097,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.514.849.101,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 20.000.000,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 998.023.542,-
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 432.192.639,-
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 113.766.437,-

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,



HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. AKHMAD HAIRIN, MP

Jabatan : Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Pihak Pertama,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Pihak Kedua,

Ir. AKHMAD HAIRIN, MP
NIP. 19680129 199303 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	6%
2.	Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100%
3.	Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 965.311.559,-
		▪ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 414.701.402,-
		▪ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 309.322.801,-
		▪ Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 51.270.000,-
		▪ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 190.017.356,-

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Pih. Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Ir. AKHMAD HAIRIN, MP
NIP. 19680129 199303 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. AKHMAD HAIRIN, MP

Jabatan : Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022



Pihak Kedua,

Ir. AKHMAD HAIRIN, MP
NIP. 19680129 199303 1 007

Pihak Pertama,

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP. 19700502 199202 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100%
2.	Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100%
3.	Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	2,3%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 575.075.657,-
		▪ Penagihan Pajak Daerah	Rp 540.295.657,-
		▪ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 34.780.000,-

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP. 197005021992021002

Plh. Kepala Badan Pendapatan
Daerah,



Ir. AKHMAD HAIRIN, MP
NIP. 196801291993031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA WARDHANA, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. AKHMAD HAIRIN, MP

Jabatan : Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,


Ir. AKHMAD HAIRIN, MP
NIP. 19680129 199303 1 007

Pihak Pertama,


INDRA WARDHANA, S.STP
NIP. 19831106 200212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	5,00%
2.	Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	4,50%
		Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	0,76%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 136.343.245,-
		▪ Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 62.985.110,-
		▪ Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 23.355.000,-
		▪ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 50.003.135,-

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Ir. AKHMAD HAIRIN, MP
NIP. 19680129 199303 1 007

Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan,

INDRA WARDHANA, S.STP
NIP. 19831106 200212 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HUSNAH, SST

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Pihak Pertama,

HUSNAH, SST
NIP. 19821010 200903 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**


No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPAP	6 Dokumen
2.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAPKIN, LKPJ-LPPD	2 Dokumen
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan TPP ASN	12 Bulan
		Jumlah Bulan Pembayaran Tambahan Penghasilan Lainnya Pegawai	12 Bulan
4.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran / Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Akhir Tahun yang disusun Bendahara Pengeluaran SKPD	19 Laporan
		Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.718.097,-
		▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 8.078.120,-
		▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.639.977,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.514.849.101,-
		▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.511.875.552,-
		▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp, 2.973.549 -

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,



HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



HUSNAH, SST
NIP. 19821010 200903 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANI MULIANA, S.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Pihak Pertama,

NANI MULIANA, S.Pd
NIP. 19840526 200604 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RB dan ZI	2 Laporan
2.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis	3 Orang
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	16 Jenis
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	45 Jenis
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	19 Jenis
5.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak	8 Jenis
		Jumlah Penggandaan	19.373 Lembar
6.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Harian	2 Jenis/SKH
		Jumlah Buku/Literatur Bacaan Lainnya	4 Jenis/Buku
7.	Tersedianya Bahan/Material	Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan	2 Jenis/Event
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan	30 Kali
		Jumlah Rapat yang Dilaksanakan	5 Kali
		Jumlah Tamu	150 Orang
9.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik yang Terbayar	4 Jenis Rekening
10.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	1 Jenis
11.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Asuransi Kesehatan, JKK, dan JKM Untuk 14 Orang PTT	12 Bulan
		Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium 14 Orang PTT	12 Bulan
		Jumlah Bulan Pengiriman Paket/Surat/Dokumen SKPD	12 Bulan
12.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua yang Dipelihara	10 Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat yang Dipelihara	5 Unit
14.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	4 Jenis
15.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara	1 Unit Gedung
16.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Jenis

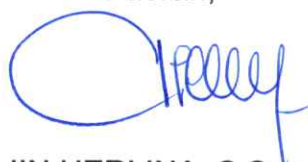
PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 20.000.000,-
		▪ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 20.000.000,-
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 998.023.542,-
		▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 8.191.686,-
		▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 279.756.489,-
		▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 15.361.111,-
		▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.480.000,-
		▪ Penyediaan Bahan/Material	Rp 13.000.000,-
		▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 678.234.256,-
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 432.192.639,-
▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 88.035.634,-		

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		▪ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.831.405,-
		▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 342.325.600,-
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 113.766.437,-
		▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 14.113.620,-
		▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 66.192.000,-
		▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 14.410.000,-
		▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 13.110.817,-
		▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.940.000,-

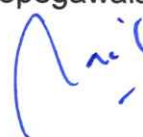
Pelaihari, 21 Oktober 2022

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,



HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



NANI MULIANA, S.Pd
NIP. 19840526 200604 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IZZUDDIN, S.AP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Pihak Pertama,

M. IZZUDDIN, S.AP
NIP. 19781010 200901 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Objek Pajak Daerah yang Didata/Diverifikasi	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data PBB-P2 yang berhasil divalidasi & diverifikasi	9950 Objek Pajak
		Jumlah Penyelesaian Keberatan PBB-P2 dan BPHTB yang Difasilitasi	50 Objek Pajak
		Jumlah Petugas Pendata	12 Orang
3.	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah Dan Penetapan Pajak Daerah	2.000 Ketetapan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 775.294.203,-
		▪ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 414.701.402,-
		▪ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 309.322.801,-
		▪ Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 51.270.000,-

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah,

M. IZZUDDIN, S.AP
NIP. 19781010 200901 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASMI NOORBANA, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Pihak Pertama,

HASMI NOORBANA, S.Kom
NIP. 19760830 200501 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan SPPT PBB-P2 yang tersampaikan	132.000 SPPT
		Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi	1.000 SSPD
		Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Konsultasi tentang PBB dan BPHTB	215 Wajib Pajak

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 190.017.356,-
		▪ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 190.017.356,-

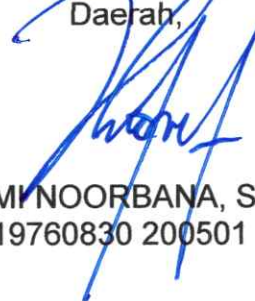
Pelaihari, 21 Oktober 2022

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah,



HASMI NOORBANA, S.Kom
NIP. 19760830 200501 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDY WIJAYANTO, A.Md

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP. 19700502 199202 1 002

Pihak Pertama,

RUDY WIJAYANTO, A.Md
NIP. 19880804 201502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan dari BPHTB	3 Dokumen
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Piutang	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 540.295.657,-
		▪ Penagihan Pajak Daerah	Rp 540.295.657,-

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,

Plt. Kepala Sub Bidang Penagihan
Pajak Daerah,

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP. 19700502 199202 1 002

RUDY WIJAYANTO, A.Md
NIP. 19880804 201502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIJA NUPARI, S.ST

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, Dan Evaluasi Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP. 19700502 199202 1 002

Pihak Pertama,

RIJA NUPARI, S.ST
NIP. 19770718 200901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 34.780.000,-
		▪ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 34.780.000,-

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP. 19700502 199202 1 002

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan,
Monitoring, Pembukuan, Dan Evaluasi
Pajak Daerah,



RIJA NUPARI, S.ST
NIP. 19770718 200901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABERIANSYAH, S.AP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : INDRA WARDHANA, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INDRA WARDHANA, S.STP
NIP. 19831106 200212 1 001

Pihak Pertama,

ABERIANSYAH, S.AP
NIP. 19660911 199803 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pendapatan dari Retribusi Daerah di Tahun Berjalan	Rp 7.088.334.000,-
		Jumlah SKPD Penghasil Pendapatan yang Dimonev	25 SKPD

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 50.003.135,-
		▪ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 50.003.135,-

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan,



INDRA WARDHANA, S.STP
NIP. 19831106 200212 1 001

Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah,



ABERIANSYAH, S.AP
NIP. 19660911 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : INDRA WARDHANA, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INDRA WARDHANA, S.STP
NIP. 19831106 200212 1 001

Pihak Pertama,

NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom
NIP. 19771113 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	2 Dokumen
		Jumlah kegiatan terkait data penerimaan pendapatan daerah di tahun berjalan	4 Kali/Laporan
2.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 86.340.110,-
		▪ Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 62.985.110,-
		▪ Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 23.355.000,-

Pelaihari, 21 Oktober 2022

Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan,



INDRA WARDHANA, S.STP
NIP. 19831106 200212 1 001

Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan,



NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom
NIP. 19771113 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUSNAH, S.ST
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 28 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP 19700502 199202 1 002

PIHAK PERTAMA,

HUSNAH, S.ST
NIP 19821010 200903 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pembukuan dan Evaluasi Pajak Daerah	Kecamatan	11
2.	Mengarsipkan dokumen yang berhubungan dengan pembukuan dan evaluasi pajak daerah	Dokumen	2
3.	Melaksanakan proses akuntansi sampai dengan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah	Laporan / Triwulan	4
4.	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penagihan, monitoring dan evaluasi pajak daerah	Kecamatan	11
5.	Melaksanakan penagihan terhadap pajak daerah	Dokumen	11
6.	Melaksanakan analisis dan pelaporan realisasi anggaran penerimaan terhadap target penerimaan pajak daerah	Laporan	1
7.	Melaksanakan optimalisasi pajak daerah	Aplikasi	2
8.	Melaksanakan analisis dan pelaporan piutang pajak daerah	Laporan / Triwulan	4
9.	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pendapatan asli daerah (PAD)	Dokumen	1
10.	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang dan kewenangannya	Laporan	1

Pelaihari, 28 Maret 2022

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP 19700502 199202 1 002

Analisis Keuangan Pusat
dan Daerah Muda

HUSNAH, S.ST
NIP 19821010 200903 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRLIN PURNAMAWATI, A.Md
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : INDRA WARDHANA, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain Retribusi dan Pelaporan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

Kepala Bidang
Pendapatan Lain-lain
Retribusi Daerah dan Pelaporan,

INDRA WARDHANA, S.STP
NIP 19831106 200212 1 001

Analis Keuangan Pusat
dan Daerah Muda

IRLIN PURNAMAWATI, A.Md
NIP 19770409 199703 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintahan pusat dan provinsi.	Kegiatan	12 Bulan
2.	Mengumpulkan, Menghimpun, Menganalisis dan Menyajikan data Pendapatan Daerah dan Pusat	Data	240
3.	Mengumpulkan, menghimpun, melaksanakan Identifikasi dan analisis realisasi penerimaan pendapatan DBH Pusat	Laporan	12 Bulan
4.	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang pembukuan dan Pelaporan.	Kegiatan	12 Bulan
5.	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembukuan pendapatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sinkronisasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Dokumen	6 Dokumen
6.	Mengumpulkan, menghimpun, melaksanakan Identifikasi dan analisis realisasi penerimaan pendapatan DBH Provinsi	Laporan	12 Bulan
7.	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang dan kewenangannya	Kegiatan	12 Bulan

Pelaihari, 3 Januari 2022

Kepala Bidang
Pendapatan Lain-lain
Retribusi Daerah dan Pelaporan,

INDRA WARDHANA, S.STP
NIP 19831106 200212 1 001

Analisis Keuangan Pusat
dan Daerah Muda,

IRLIN PURNAMAWATI, A.Md
NIP 19770409 199703 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. FAHRUJI, SE, Ak, MM
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

Kepala Bidang
Pengelolaan Pajak Daerah,

Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP 19721106 199101 1 001

Analis Keuangan Pusat
dan Daerah Muda,

H. FAHRUJI, SE, Ak, MM
NIP 19651130 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Melaksanakan verifikasi data pajak daerah	1.	Jumlah dokumen objek pajak daerah yang didata/diverifikasi	1 Dokumen

Pelaihari, 3 Januari 2022

Kepala Bidang
Pengelolaan Pajak Daerah,

Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP 19721106 199101 1 001

Analisis Keuangan Pusat
dan Daerah Muda,

H. FAHRUJI, SE, Ak, MM
NIP 19651130 198903 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAFIZ ANSYARI, S.Ak.

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : IRLIN PURNAMAWATI, A.Md

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 April 2022

Pihak Kedua,

IRLIN PURNAMAWATI, A.Md
NIP. 19770409 199703 2 002

Pihak Pertama,

HAFIZ ANSYARI, S.Ak.
NIP. 19940207 202203 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Melaksanakan tugas lainnya diperintah oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Kegiatan	192 Kegiatan
2.	Membantu membuat surat ke luar yang berkaitan dengan laporan perencanaan dan keuangan, dengan diparaf oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh Kepala Badan	Jumlah Surat	2 Surat
3.	Membantu membuat laporan triwulan untuk kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan
4.	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penginputan laporan kinerja dan keuangan (per triwulan) ke E-Monev	Jumlah Laporan	3 Laporan
5.	Membantu menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional sub kegiatan dan revisi anggaran	Jumlah Kegiatan	7 Kegiatan
6.	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dalam membuat Perjanjian Kinerja untuk Eselon II, III, dan IV	Jumlah Dokumen	3 Dokumen
7.	Membantu menghimpun dan menyusun RKA Belanja Murni dan RKA Belanja Perubahan	Jumlah Kegiatan	16 Kegiatan
8.	Membantu menghimpun, memverifikasi dan mendistribusikan, serta mengolah DPA Murni dan DPA Perubahan	Jumlah Dokumen	9 Dokumen
9.	Membantu Melaksanakan sub kegiatan yang ada pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, pada tahun yang berkenaan	Jumlah Kegiatan	124 Kegiatan

Pelaihari, 01 April 2022

Plt. Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan,



IRLIN PURNAMAWATI, A.Md
NIP. 19770409 199703 2 002

Penyusun Program Anggaran dan
Pelaporan,



HAFIZ ANSYARI, S.Ak.
NIP. 19940207 202203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI REJEKI, A.Md.Pjk
Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dra. NURLENASARI
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

Dra. NURLENASARI
NIP 19640212 199008 2 001

PIHAK PERTAMA,

SRI REJEKI, A.Md.Pjk
NIP 19800403 200701 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Melakukan pembuatan Surat Permintaan Pembayaran sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah laporan SPP - SPM dan lainnya yang dibuat untuk kelengkapan SP2D	96 Dokumen
2.	Melakukan pencatatan pembukuan pada Buku Kas sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk tertib administrasi	Jumlah kegiatan dalam penerimaan dan pengeluaran uang pada BKU yang diproses sesuai dengan rekening koran dan prosedur yang berlaku	144 Kegiatan
3.	Melakukan penyampaian kuitansi dan bukti dukung lainnya kepada pimpinan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk mendapat catatan persetujuan pembayaran pada lembar disposisi	Jumlah kuitansi dan bukti pendukung lainnya yang disampaikan kepada pimpinan untuk setuju dibayarkan	1230 Dokumen
4.	Melakukan pembayaran uang sesuai kwitansi, bukti dukung lainnya serta persetujuan pembayaran dan petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah laporan atas tagihan-tagihan sesuai dengan kuitansi/SPJ yang telah diverifikasi dan disetujui pimpinan untuk dibayarkan	1230 Dokumen
5.	Melakukan pembayaran setoran uang pajak dan lainnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah kegiatan dalam penginputan, pemotongan dan penyetoran pajak yang dimasukkan dalam SIPD	40 Kegiatan
6.	Melakukan penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun untuk disampaikan ke Instansi terkait	19 Dokumen
7.	Melakukan penginputan kwitansi / SPJ yang dibayarkan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) sebagai pertanggungjawaban pimpinan	Jumlah kegiatan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban pimpinan yang diinput dalam SIPD	1230 Kegiatan
8.	Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah kegiatan tugas lainnya yang dilaksanakan	5 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

Dra. NURLENASARI
NIP 19640212 199008 2 001

PIHAK PERTAMA,

SRI REJEKI, A.Md.Pjk
NIP 19800403 200701 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAMILAH, A.Md
Jabatan : Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dra. NURLENASARI
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

Dra. NURLENASARI
NIP 19640212 199008 2 001

PIHAK PERTAMA,

KAMILAH, A.Md
NIP. 19821008 201001 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta buku kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan /penelitian	Jumlah SPJ yang diterima dan dicatat untuk diverifikasi	235 Dokumen
2.	Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah SPJ yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	235 Dokumen
3.	Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan	Jumlah pengembalian SPJ yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dilakukan perbaikan	15 Dokumen
4.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan	Jumlah tugas kedinasan lainnya yang dilaksanakan	25 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

Dra. NURLENASARI
NIP 19640212 199008 2 001

PIHAK PERTAMA,

KAMILAH, A.Md
NIP 19821008 201001 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAYARINA, A.Md
Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : NANI MULIANA, S.Pd
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

NANI MULIANA, S.Pd
NIP 19840526 200604 2 008

PIHAK PERTAMA,

MAYARINA, A.Md
NIP 19700314 200701 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Jumlah laporan sarana dan prasarana kantor sesuai program kerja tahunan yang disusun	2 Laporan
2.	Memantau sarana dan prasarana kantor sesuai dengan bidang dan tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	Jumlah data sarana dan prasarana kantor sesuai dengan rencana awal yang dipantau	24 Data
3.	Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Jumlah laporan inventarisasi sarana dan prasarana kantor yang dikendalikan	5 Berkas
4.	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Jumlah laporan sarana dan prasarana kantor yang dikoordinasikan dengan Instansi terkait	16 Laporan
5.	Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Jumlah laporan sarana dan prasarana kantor yang dievaluasi dan disusun secara berkala	18 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan secara tertulis maupun lisan	Jumlah tugas kedinasan lainnya yang dilaksanakan	70 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

NANI MULIANA, S.Pd
NIP 19840526 200604 2 008

PIHAK PERTAMA,

MAYARINA, A.Md
NIP 19700314 200701 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHALLI
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : HASMI NOORBANA, S.Kom
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

HASMI NOORBANA, S.Kom
NIP 19760830 200501 1 010

PIHAK PERTAMA,

MUHALLI
NIP 19651114 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

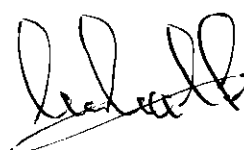
NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Membantu menyampaikan SPPT PBB-P2 baru (Ekstensifikasi)	Jumlah SPPT PBB-P2 yang disampaikan	3000 Wajib Pajak
2.	Membantu melakukan penagihan PBB-P2	Jumlah Desa/Kelurahan yang ditagih PBB-P2 nya	135 Desa/ Kelurahan
3.	Membantu pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani	4000 Wajib Pajak
4.	Membantu melakukan rekonsiliasi pemeriksaan BPHTB	Jumlah kegiatan rekonsiliasi BPHTB dengan PPAT dan BPN setempat	4 Kegiatan
5.	Membantu menyiapkan penghapusan PBB-P2	Jumlah Desa/Kelurahan untuk penghapusan PBB-P2	1 Desa/ Kelurahan
6.	Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah tugas kedinasan lainnya yang dilaksanakan	5 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,


HASMI NOORBANA, S.Kom
NIP 19760830 200501 1 010

PIHAK PERTAMA,


MUHALLI
NIP 19651114 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LINDA NOVIANTI, SE
Jabatan : Analis Pajak dan Retribusi Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : ASPI SETIA RAHMAN S.Pt
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 14 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

ASPI SETIA RAHMAN S.Pt
NIP 19820929 201406 1 002

PIHAK PERTAMA,

LINDA NOVIANTI, SE
NIP 19930924 201903 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	KINERJA UTAMA	JUMLAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan		Jumlah bahan dalam pengumpulan bahan-bahan kerja	18 bahan
2.	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Pajak dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas		Jumlah kegiatan dalam penganalisaan bahan-bahan kerja	27 kegiatan
3.	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan pajak dalam rangka menyelesaikan pekerjaan		Jumlah kegiatan penelitian permasalahan pajak	9 kegiatan
4.	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat		Jumlah laporan hasil kerja	1 laporan
5.	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit		Jumlah kegiatan dalam pemberian saran berdasarkan pekerjaan dan pemanfaatannya	9 kegiatan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan		Jumlah tugas kedinasan lainnya yang dilaksanakan	45 tugas

Pelaihari, 14 Maret 2022

PIHAK KEDUA

ASPI SETIA RAHMAN S.Pt
NIP 19820929 201406 1 002

PIHAK PERTAMA

LINDA NOVIANTI, SE
NIP 19930924 201903 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUDY WIJAYANTO, A.Md
Jabatan : Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : ASPI SETIA RAHMAN S.Pt
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

ASPI SETIA RAHMAN S.Pt
NIP 19820929 201406 1 002

PIHAK PERTAMA,

RUDY WIJAYANTO, A.Md
NIP 19880804 201502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama 1	Indikator Kinerja 2	Target 3
1.	Membantu melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	2
2.	Membantu melaksanakan penyusunan bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah	Dokumen	3
3.	Membantu melaksanakan penagihan terhadap pajak daerah dan piutang pajak daerah	Jumlah Kegiatan	35
4.	Membantu melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat himbauan, surat teguran dan surat tagihan, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan	Dokumen	11
5.	Mengelola dan menyajikan data pajak daerah dan piutang pajak daerah	Jumlah Kegiatan	11
6.	Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan perintah atasan	Jumlah Kegiatan	150 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

ASPI SETIA RAHMAN S.Pt
NIP 19820929 201406 1 002

PIHAK PERTAMA,

RUDY WILAYANTO, A.Md
NIP 19880804 201502 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSIAR
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,


ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP 19820929 201406 1 002

PIHAK PERTAMA,


SYAMSIAR
NIP 19650113 200604 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menerima, mencatat, dan menyortir administrasi nota perhitungan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah data administrasi perhitungan/penagihan pajak daerah yang dicatat	240 Data
2.	Memberi lembar pengantar pada administrasi nota perhitungan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar perhitungan/penagihan pajak daerah yang dihimpun	240 Lembar/Surat
3.	Mengelompokkan administrasi nota perhitungan pajak dan retribusi daerah atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah kegiatan dalam melaksanakan pendataan administrasi perhitungan/penagihan pajak daerah	60 Kegiatan
4.	Mendokumentasikan administrasi nota perhitungan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah laporan dalam pengadministrasian data perhitungan/penagihan pajak daerah	12 Dokumen
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	96 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah tugas kedinasan lainnya yang dilaksanakan	24 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,


ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP 19820929 201406 1 002

PIHAK PERTAMA,


SYAMSIAR
NIP 19650113 200604 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENI ANGRAINI, S.Ak
Jabatan : Analis Pajak dan Retribusi Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : RIJA NUPARI, S.ST
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 14 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

RIJA NUPARI, S.ST
NIP 19770718 200901 1 001

PIHAK PERTAMA,

RENI ANGRAINI, S.Ak
NIP 19840613 201001 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Mengumpulkan bahan bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Bahan	27 Bahan
2.	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan bahan sesuai dengan pajak dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah kegiatan	36 Kegiatan
3.	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan pajak dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah kegiatan	27 Kegiatan
4.	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah Laporan	9 laporan
5.	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah Kegiatan	27 Kegiatan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Tugas	150 kegiatan

Pelaihari, 14 Maret 2022

Kasubbag Perencanaan & Keuangan

RIJA NUPARI, S.ST
NIP 19770718 200901 1 001

Analisis Pajak dan Retribusi

RENI ANGRAINI, S.Ak
NIP 19840613 201001 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL WAHID, SH
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : RIJA NUPARI, S.ST
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 14 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

RIJA NUPARI, S.ST
NIP 19770718 200901 1 001

PIHAK PERTAMA,

ABDUL WAHID, SH
NIP 19770221 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	KINERJA UTAMA	JUMLAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Membantu melaksanakan pemeriksaan kantor dan/atau lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak daerah		Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pajak	36 Kegiatan
2.	Membantu melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan dan Evaluasi Pajak Daerah		Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan, monitoring, pembukuan dan evaluasi pajak daerah	36 Kegiatan
3.	Membantu mengarsipkan dokumen yang berhubungan dengan pemeriksaan, monitoring, pembukuan dan evaluasi pajak daerah		Jumlah dokumen yang diarsipkan	100 dokumen
4.	Membantu menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB dan SSPD BPHTB		Jumlah dokumen yang diterima dan dicatat	135 dokumen
5.	Melaksanakan tugas lainnya yang diperitahkan oleh atasan		Jumlah tugas kedinasan lainnya yang dilaksanakan	10 Kegiatan

Pelaihari, 14 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

RIJA NUPARI, S.ST
NIP 19770718 200901 1 001

PIHAK PERTAMA,

ABDUL WAHID, SH
NIP 19770221 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHWAN YANURI
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : RIJA NUPARI, S.ST
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

RIJA NUPARI, S.ST
NIP 19770718 200901 1 001

PIHAK PERTAMA,

AKHWAN YANURI
NIP 19790809 200901 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Membantu dalam penyusunan perencanaan, program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sub bidang pemeriksaan, monitoring, pembukuan dan evaluasi pajak daerah	Jumlah dokumen penyusunan terkait tugas-tugas pada sub bidang pemeriksaan monitoring, pembukuan dan evaluasi pajak daerah	1 Dokumen
2.	Membantu dalam melaksanakan pemeriksaan kantor dan / atau lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak daerah	Jumlah laporan terkait pemeriksaan kantor atau lapangan	2 Laporan
3.	Membantu dalam melaksanakan pemeriksaan lain dalam rangka ketentuan	Jumlah tugas pemeriksaan lain dalam ketentuan perpajakan daerah	8 kegiatan
4.	Membantu dalam melaksanakan proses permohonan wajib pajak yang berkaitan dengan keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, kompensasi dan restitusi, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah	Jumlah laporan terkait permohonan wajib pajak yang keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah	6 laporan
5.	Mengarsip dokumen yang berhubungan dengan pemeriksaan, monitoring, pembukuan dan evaluasi pajak daerah.	Jumlah dokumen yang diarsipkan	6 dokumen
6.	Membantu dalam menyiapkan bahan – bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, SKPD, SKPD kurang bayar	Jumlah dokumen yang disiapkan	6 dokumen
7.	Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah tugas lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan perintah atasan	360 kegiatan
8.	Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan	Jumlah laporan kegiatan yang dilaporkan kepada atasan	230 kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

RIJA NUPARI, S.ST
NIP 19770718 200901 1 001

PIHAK PERTAMA,

AKHWAN YANURI
NIP 19790809 200901 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI HARTATI, A.Md
Jabatan : Pengelola Pendapatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : NOVIAN ISKANDAR Z, S.Kom
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendapatan lain-lain dan Perencanaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

NOVIAN ISKANDAR Z, S.Kom
NIP 19771113 201001 1 006

PIHAK PERTAMA,

DEWI HARTATI, A.Md
NIP 19800612 201101 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyusun program kerja , bahan dan alat pengelolaan pendapatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Jumlah data/bahan dalam penyusunan program kerja pengelolaan pendapatan	12 Dokumen
2.	Memantau pengelolaan pendapatan, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	Jumlah dokumen penerimaan pendapatan yang dipantau	12 Dokumen
3.	Mengendalikan pengelolaan pendapatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Jumlah kegiatan untuk mengendalikan pengelolaan penerimaan pendapatan	12 Kegiatan
4.	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau Instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Jumlah kegiatan dalam mengkoordinasikan penerimaan pendapatan dengan unit/bidang terkait	12 Kegiatan
5.	Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Jumlah laporan penerimaan pendapatan yang disusun untuk disampaikan kepada pimpinan dan Instansi terkait	12 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas lainnya yang dilaksanakan	12 Kali

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

NOVIAN ISKANDAR Z, S.Kom
NIP 19771113 201001 1 006

PIHAK PERTAMA,

DEWI HARTATI, A.Md
NIP 19800612 201101 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD JAZULI
Jabatan : Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : ABERIANSYAH, S.AP
Jabatan : Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

ABERIANSYAH, S.AP
NIP 19660911 199803 1 002

PIHAK PERTAMA,

MUHAMMAD JAZULI
NIP 19760614 200801 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menerima, mencatat, dan menyortir administrasi data penyajian dan publikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah data dan publikasi yang disajikan sesuai dengan ketentuan	111 Kali
2.	Memberi lembar pengantar pada administrasi data penyajian dan publikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar yang dibuat	101 Lembar Pengantar
3.	Mengelompokkan administrasi data penyajian dan publikasi atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah ketetapan dalam penyajian data dan publikasi	386 Surat Ketetapan
4.	Mendokumentasikan administrasi data penyajian dan publikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah objek retribusi yang ditagih	365 Objek Retribusi
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil tugas yang dilaksanakan	12 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	20 Laporan/Surat

Pelaihari, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

ABERIANSYAH, S.AP
NIP 19660911 199803 1 002

PIHAK PERTAMA,

MUHAMMAD JAZULI
NIP 19760614 200801 1 021

POHON KINERJA BAPENDA TANAH LAUT TAHUN 2022

KEPALA BADAN

KINERJA UTAMA :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

INDIKATOR KINERJA :

1. Persentase pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
3. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

SEKRETARIS

KINERJA UTAMA :

1. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

INDIKATOR KINERJA :

1. Nilai Indek kepuasan pelayanan SKPD
2. Nilai hasil evaluasi RB
3. Nilai hasil evaluasi ZI
4. Nilai hasil evaluasi SAKIP
5. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

KEPALA BIDANG PENAGIHAN, PEMERIKSAAN, DAN PEMBUKUAN

KINERJA UTAMA :

1. Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
2. Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)
3. Menurunnya tunggakan PBB-P2

INDIKATOR KINERJA :

1. Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
2. Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)
3. Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

KINERJA UTAMA :

1. Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid
2. Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah
3. Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah

INDIKATOR KINERJA :

1. Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid
2. Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah
3. Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah

KEPALA BIDANG PENDAPATAN LAIN LAIN, RETRIBUSI DAERAH DAN PELAPORAN

KINERJA UTAMA :

1. Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah
2. Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah

INDIKATOR KINERJA :

1. Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah
2. a. Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah
b. Persentase pertumbuhan Penerimaan pendapatan dari retribusi daerah

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KINERJA UTAMA :

1. Tertaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
6. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Tersedianya Bahan/Material
8. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

INDIKATOR KINERJA :

1. Jumlah Dokumen RB dan ZI
2. Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis
3. Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia
4. a. Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia
b. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia
5. a. Jumlah Barang yang Dicetak
b. Jumlah Penggandaan

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KINERJA UTAMA :

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
4. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPAP
2. Jumlah dokumen LAPKIN, LKPJ-LPPD
3. a. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan TPP ASN
b. Jumlah Bulan Pembayaran Tambahan Penghasilan Lainnya Pegawai
4. a. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran / Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Akhir Tahun yang disusun Bendaharan Pengeiuran SKPD
b. Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD

- 6. a. Jumlah Bahan Bacaan Harian
- b. Jumlah Buku/Literatur Bacaan Lainnya
- 7. Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan
- 8. a. Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan
- b. Jumlah Rapat yang Dilaksanakan
- c. Jumlah Tamu
- 9. Jumlah Jenis Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik yang Terbayar
- 10. Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara
- 11. a. Jumlah Bulan Pembayaran Asuransi Kesehatan, JKK, dan JKM Untuk 14 Orang PTT
- b. Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium 14 Orang PTT
- c. Jumlah Bulan Pengiriman Paket/Surat/Dokumen SKPD
- 12. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
- 13. a. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua yang Dipelihara
- b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat yang Dipelihara
- 14. Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara
- 15. Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara
- 16. Jumlah Sarana & Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara

KASUBBID PEMERIKSAAN, MONITORING, PEMBUKUAN, DAN EVALUASI PAJAK DAERAH

KINERJA UTAMA :

1. Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

INDIKATOR KINERJA :

1. Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

KASUBBID PENAGIHAN PAJAK DAERAH

KINERJA UTAMA :

1. Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah

INDIKATOR KINERJA :

1. a. Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan dari BPHTB

 b. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Piutang

KASUBBID PELAYANAN PAJAK DAERAH

KINERJA UTAMA :

1. Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah

INDIKATOR KINERJA :

1. a. Jumlah layanan SPPT PBB-P2 yang tersampaikan

 b. Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi

 c. Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Konsultasi tentang PBB dan BPHTB

KASUBBID PENDATAAN, PENETAPAN PAJAK DAERAH

KINERJA UTAMA :

1. Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

2. Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

3. Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

INDIKATOR KINERJA :

1. Jumlah Dokumen Objek Pajak Daerah yang Didata/Diverifikasi

2. a. Jumlah data PBB-P2 yang berhasil divalidasi & diverifikasi

 b. Jumlah Penyelesaian Keberatan PBB-P2 dan BPHTB yang Difasilitasi

 c. Jumlah Petugas Pendata

3. Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah Dan Penetapan Pajak Daerah

KASUBBID RETRIBUSI DAERAH

KINERJA UTAMA :

1. Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah Pendapatan dari Retribusi Daerah di Tahun Berjalan

2. Jumlah SKPD Penghasil Pendapatan yang Dimonev

KASUBBID PENDAPATAN LAIN LAIN, PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERENCANAAN PENDAPATAN

KINERJA UTAMA :

1. Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

2. Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

INDIKATOR KINERJA :

1. a. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

 b. Jumlah Kegiatan Terkait Data Penerimaan Pendapatan Daerah di Tahun Berjalan

2. Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi

Pelaihari, 1 Maret 2023



 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Tanah Laut,
 Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
 NIP. 19680916 199010 1 001

Capaian Kinerja Per Triwulan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi 2022				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1.	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8,00 %	-	-	-25,43%	5,98%	74,76%
	2.	Persentase Pertumbuhan PAD	4,12 %	-	-	-31,14%	-5,94%	-144,19%
	3.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,63 %	-	-	3,25%	8,98%	104,05%

Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100%	-	-	-	123,25%	123,25%
2.	Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100%	-	-	-	106,84%	106,84%
3.	Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	2,30%	-	-	-	1,37%	59,57%

Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2022				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	1.	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi penerimaan dari BPHTB	3 Dokumen	-	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	100%
	2.	Jumlah laporan realisasi penerimaan piutang	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100%

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2022				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1.	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan pajak daerah	1 Dokumen	100%	-	-	1 Dokumen	100%

Kepala Pengelolaan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	6%	-	-	-	5,27%	112,17%
Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100%	-	-	-	100%	100%
Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100%	-	-	-	100%	100%

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2022				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1.	Jumlah dokumen objek pajak daerah yang didata / diverifikasi	3 Dokumen	-			3 Dokumen	100%
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.	Jumlah data PBB-P2 yang berhasil divalidasi dan diverifikasi	9950 Objek Pajak	-	9.232 Objek Pajak	9.232 Objek Pajak	9950 Objek Pajak	100%
	2.	Jumlah penyelesaian keberatan PBB-P2 dan BPHTB yang difasilitasi	50 Objek Pajak	-	20 Objek Pajak	35 Objek Pajak	50 Objek Pajak	100%
	3.	Jumlah petugas pendata	12 Orang	-	8 Orang	8 Orang	12 Orang	100%
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.	Jumlah penetapan Wajib Pajak Daerah dan penetapan pajak daerah	2.000 Ketetapan	-	874 Ketetapan	1.306 Ketetapan	2.000 Ketetapan	100%

Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2022				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.	Jumlah layanan SPPT PBB-P2 yang tersampaikan	132.000 SPT	-	-		132.000 SPT	100%
	2.	Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi	1.000 SPPD	-	-	-	1.000 SPPD	100%
	3.	Jumlah Wajib Pajak yang melakukan konsultasi tentang PBB dan BPHTB	215 Wajib Pajak	-	-	-	215 Wajib Pajak	100%

Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2022				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1.	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	5,00%				48,86%	977,20%
Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1.	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	4,50%				48,98%	1088,42%
	2.	Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi daerah	0,76%				21,39%	2814,44%

Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2022				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.	Jumlah pendapatan dari retribusi daerah di tahun berjalan	Rp 7.088.334.000	-	Rp 1.516.726.500	Rp 4.298.745.877	Rp 6.958.536.407	99,08%
	2.	Jumlah SKPD penghasil pendapatan yang dimonev	25 SKPD	-	25 SKPD	25 SKPD	25 SKPD	100%

Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2022				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1.	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	2.	Jumlah kegiatan terkait data penerimaan pendapatan daerah di tahun berjalan	4 Kali / Laporan	-	2 Kali / Laporan	2 Kali / Laporan	4 Kali / Laporan	100%
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.	Jumlah dokumen hasil penelitian dan verifikasi keakuratan data pelaporan pendapatan daerah yang disusun	6 Dokumen	-	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	100%

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1.	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	80 (B)	-	-	-	84,72 (A)	105,90%
	2.	Nilai Hasil Evaluasi RB	77 (BB)	-	-	-	64,15 (B)	83,31%
	3.	Nilai Hasil Evaluasi ZI	77 (BB)	-	-	-	85,77 (A)	111,39%
	4.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77 (BB)	-	-	-	77,2 (BB)	100,26%
	5.	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	100%	100%

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPAP	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	100%
Terlaksana Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAPKIN, LKPJ-LPPD	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan TPP ASN	12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	100%
	Jumlah Bulan Pembayaran Tambahan Penghasilan Lainnya Pegawai	12 Bulan	2 Bulan	5 Bulan	8 Bulan	12 Bulan	100%
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran / Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Akhir Tahun yang disusun Bendahara Pengeluaran SKPD	19 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	13 Laporan	19 Laporan	100%
	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	100%

Kepala Sub Bagian Umum Kepegawian

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RB dan ZI	2 Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis	3 Orang	-	-	-	-	-
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	16 Jenis	-	-	-	14 Jenis	87,50%
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	45 Jenis	-	8 Jenis	15 Jenis	40 Jenis	90,63%
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	19 Jenis	-	0 Jenis	0 Jenis	18 Jenis	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak	8 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	4 Jenis	79,49%
	Jumlah Penggandaan	19.373 Lembar	-	2550 Lembar	6.928 Lembar	11.428 Lembar	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Harian	2 Jenis/SKH	2 Jenis/SKH	2 Jenis/SKH	2 Jenis/SKH	2 Jenis/SKH	30,56%
	Jumlah Buku/Literatur Bacaan Lainnya	4 Jenis /Buku	-	-	-	-	
Tersedianya Bahan/Material	Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan	2 Jenis / Event	-	-	-	2 Jenis / Event	100%
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan	30 Kali	-	12 Kali	14 Kali	30 Kali	100%
	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan	5 Kali	-	2 Kali	4 Kali	5 Kali	
	Jumlah Tamu	150 Orang	-	27 Orang	41 Orang	150 Orang	

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik yang Terbayar	4 Jenis Rekening	-	3 Jenis Rekening	3 Jenis Rekening	4 Jenis Rekening	100%
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	1 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Asuransi Kesehatan, JKK, dan JKM Untuk 14 Orang PTT	12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	100%
	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium 14 Orang PTT	12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	
	Jumlah Bulan Pengiriman Paket/Surat/Dokumen SKPD	12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua yang Dipelihara	10 Unit	-	5 Unit	8 Unit	10 Unit	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat yang Dipelihara	5 Unit	-	4 Unit	4 Unit	5 Unit	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	4 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	100%
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara	1 Unit Gedung	-	-	1 Unit Gedung	1 Unit Gedung	100%

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Jenis	-	6/9 Jenis	7/9 Jenis	1 Jenis	100%

Pelaihari, 1 Maret 2023


 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Tanah Laut,
 Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 19680916 199010 1 001

MATRIKS KESELARASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Renstra 2018 -2023					Perjanjian Kinerja 2022				
TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan penggalan potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi			Persentase penerimaan pendapatan asli daerah meningkat	Persentase					Kabupaten Tanah Laut
			Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah meningkat	Persentase					
			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah meningkat	Persentase					
Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang sah			Persentase penerimaan PBB P2 dan BPHTB meningkat	Persentase					
			Persentase penerimaan pajak daerah meningkat	Persentase					
			Persentase penerimaan pendapatan lain lain dan retribusi daerah meningkat	Persentase					
	Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi		Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase	Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	8%	10.768.280.277	Kepala Badan Pendapatan Daerah
			Persentase pertumbuhan PAD	Persentase		Persentase pertumbuhan PAD	4,12%		
			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	8,63%		

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2022				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase	Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	6%	965.311.559	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
			Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase	Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100%		
			Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase	Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100%		
			Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase	Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100%	575.075.657	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan
			Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	Persentase	Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100%		
			Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	Persentase	Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	2,30%		
			Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase	Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	5,00%	136.343.245	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan
			Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	Persentase	Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	4,50%		

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2022				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	Persentase		Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	0,76%		
			Total					1.676.730.461	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase			100%	1.676.730.461	
		Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	2 Dokumen	62.985.110	Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan
						Jumlah kegiatan terkait data penerimaan pendapatan daerah di tahun berjalan	4 Kali/Laporan		
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Objek Pajak Daerah yang Didata/Diverifikasi	3 Dokumen	414.701.402	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data PBB-P2 yang berhasil divalidasi & diverifikasi	9950 Objek Pajak	309.322.801	
						Jumlah Penyelesaian Keberatan PBB-P2 dan BPHTB yang Difasilitasi	50 Objek Pajak		
						Jumlah Petugas Pendata	12 Orang		

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2022				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah Dan Penetapan Pajak Daerah	2.000 Ketetapan	51.270.000	
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan SPPT PBB-P2 yang tersampaikan	132.000 SPPT	190.017.356	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah
					Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi	1.000 SSPD			
					Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Konsultasi tentang PBB dan BPHTB	215 Wajib Pajak			
		Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	23.355.000	Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan
		Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan dari BPHTB	3 Dokumen	540.295.657	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Piutang	1 Dokumen			
		Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	34.780.000	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, Dan Evaluasi Pajak Daerah

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2022				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pendapatan dari Retribusi Daerah di Tahun Berjalan	Rp 7.088.334.000,-	50.003.135	Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah
						Jumlah SKPD Penghasil Pendapatan yang Dimonev	25 SKPD		
Mewujudkan tata kelola SKPD yang tertib, efektif dan efisien			Persentase tata kelola kesekretariatan, umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan kinerja SKPD yang memadai	Persentase					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	Nilai	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	80 (B)	9.091.549.816	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
			Nilai Hasil Evaluasi RB	Nilai		Nilai Hasil Evaluasi RB	77 (BB)		
			Nilai Hasil Evaluasi ZI	Nilai		Nilai Hasil Evaluasi ZI	77 (BB)		
			Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77 (BB)		
			Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persentase		Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100%		

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2022				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase			100%	12.718.097	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPAP	6 Dokumen	8.078.120	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAPKIN, LKPJ-LPPD, RB dan ZI	4 Dokumen	4.639.977	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase			100%	7.514.849.101	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan TPP ASN	12 Bulan	7.511.875.552	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Bulan Pembayaran Tambahan Penghasilan Lainnya Pegawai	12 Bulan		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran / Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Akhir Tahun yang disusun Bendahara	19 Laporan	2.973.549	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2022				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase			100%	20.000.000	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis	3 Orang	20.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase			100%	998.023.542	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	16 Jenis	8.191.686	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	45 Jenis	279.756.489	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	19 Jenis		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak	8 Jenis	15.361.111	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2022				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Penggandaan	19.373 Lembar		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Harian	2 Jenis/SKH	3.480.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
						Jumlah Buku/Literatur Bacaan Lainnya	4 Jenis/Buku		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Tersedianya Bahan/Material	Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan	2 Jenis/Event	13.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan	30 Kali	678.234.256	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
						Jumlah Rapat yang Dilaksanakan	5 Kali		
						Jumlah Tamu	150 Orang		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase			100%	432.192.639	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik yang Terbayar	4 Jenis Rekening	88.035.634	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	1 Jenis	1.831.405	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2022				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Asuransi Kesehatan, JKK, dan JKM Untuk 14 Orang PTT	12 Bulan	342.325.600	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
						Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium 14 Orang PTT	12 Bulan		
						Jumlah Bulan Pengiriman Paket/Surat/Dokumen SKPD	12 Bulan		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase			100%	113.766.437	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	14.113.620	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

